



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan dinamika Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur sepanjang tahun 2025 terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, kendala serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dapat tercapai sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 maupun RPJMD Tahun 2025-2029.

Selain itu, Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping itu juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan KESBANGPOL Tahun 2025.

Berkat dukungan dan kerja keras seluruh aparatur pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara umum target yang ditetapkan telah berhasil dicapai, meskipun masih terdapat kendala yang menyebabkan target belum tercapai secara optimal. Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 masih dijumpai adanya kekurangan, namun diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang. Sehingga amanah nasional yang kita emban sebagai pelayan publik, dapat kita

pertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat, bangsa dan Negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, saya selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada seluruh aparatur sipil negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Kinerja ini. Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semoga kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur semakin meningkat di tahun-tahun mendatang.

Malili, 16 Maret 2026

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR**

Kepala Badan,



SALAM LATIEF, SH,M.Si,CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690403 198903 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja organisasi berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan realisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Tahun 2025 merupakan masa transisi antara periode Renstra Tahun 2021–2024 dan Renstra Tahun 2025–2029. Pada akhir periode Renstra Tahun 2021–2024, sasaran strategis yang ditetapkan yaitu terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Target yang ditetapkan sebesar 80,47% dan terealisasi sebesar 80,84%, sehingga menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Luwu Timur berada pada kategori baik dan kondusif.

Memasuki periode Renstra Tahun 2025–2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menetapkan empat sasaran strategis yaitu meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah, meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada, meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, seluruh sasaran strategis menunjukkan capaian dengan kategori sangat tinggi. Sasaran meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah dengan indikator persentase penurunan konflik IPOLEKSOSBUD ditargetkan sebesar 18,18% dan terealisasi sebesar 72,72% atau mencapai 400% dari target. Sasaran meningkatnya partisipasi politik masyarakat dengan indikator tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada ditargetkan 80,35% dan terealisasi 80,35% dengan capaian 100%. Sasaran meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah dengan indikator persentase peran organisasi kemasyarakatan ditargetkan 52% dan terealisasi 54,48% dengan capaian 104,77%. Sementara itu, sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai AKIP perangkat daerah ditargetkan 70,00 (BB)

dan terealisasi 80,00 (BB) dengan capaian 114,28%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan seluruh sasaran strategis dapat tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Ke depan, peningkatan kualitas perencanaan kinerja, penguatan deteksi dini potensi konflik, peningkatan pendidikan politik masyarakat, serta penguatan peran organisasi kemasyarakatan akan terus dilakukan guna menjaga stabilitas daerah dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Gambaran Umum Badan Kesbangpol	4
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.4.2. Struktur Organisasi	8
1.4.3. Sumber Daya	9
1.4.3.1. Sumber Daya Manusia	9
1.4.3.2. Sarana dan Prasarana	12
1.5. Isu-Isu Strategis	16
1.6. Sistematika Penulisan	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN	19
2.1. Rencana Strategis	19
2.1.1. Visi	19
2.1.2. Misi	21
2.1.3. Tujuan dan sasaran	22
2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan	23
2.2. Indikator Kinerja Utama	25
2.3. Strategi program dan kegiatan	27
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
2.5. Perencanaan Anggaran	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1. Capaian Kinerja Badan Kesbangpol	33

3.2.	Sasaran Strategis	34
3.3.	Renstra Periode Tahun 2021-2024	36
3.3.1.	Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025	36
3.3.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	38
3.3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	39
3.3.4.	Perbandingan dengan Target Nasional atau Daerah Lain	40
3.3.5	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran	41
3.3.6	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
3.3.7	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran	44
3.3.8	Kesimpulan.....	45
3.4.	Renstra Periode Tahun 2025-2029	47
3.4.1.	Sasaran Strategis -1	47
3.4.1.1.	Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025	47
3.4.1.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	50
3.4.1.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	51
3.4.1.4.	Perbandingan dengan Target Nasional atau Daerah Lain.....	52
3.4.1.5	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran	52
3.4.1.6	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
3.4.1.7	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran	55
3.4.1. 8	Kesimpulan.....	57
3.4.2.	Sasaran Strategis -2	59
3.4.2.1.	Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025	59

3.4.2.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	62
3.4.2.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	63
3.4.2.4.	Perbandingan dengan Target Nasional atau Daerah Lain.....	64
3.4.2.5	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran	64
3.4.2.6	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
3.4.2.7	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran	67
3.4.2.8	Kesimpulan.....	68
3.4.3.	Sasaran Strategis -3	70
3.4.3.1.	Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025	70
3.4.3.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	71
3.4.3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	72
3.4.3.4.	Perbandingan dengan Target Nasional atau Daerah Lain.....	72
3.4.3.5	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran	73
3.4.3.6	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	74
3.4.3.7	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran	75
3.4.3.8	Kesimpulan.....	77
3.4.4.	Sasaran Strategis -4	79
3.4.4.1.	Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025	79
3.4.4.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	79

3.4.4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	81
3.4.4.4. Perbandingan dengan Target Nasional atau Daerah Lain.....	81
3.4.4.5 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran	82
3.4.4.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	83
3.4.4.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran	85
3.4.4.8 Kesimpulan.....	89
3.5. Realisasi Anggaran	90
BAB IV PENUTUP	109
4.2. Kesimpulan	109
4.1. Saran	110
Lampiran – Lampiran	
- Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja (LKj) Evaluasi LAKIP Tahun 2024	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Badan Kesbangpol	8
Gambar 3.1.	Dokumentasi Kegiatan “Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	46
Gambar 3.2.	Dokumentasi kegiatan “Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Program peningkatan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial”	58
Gambar 3.3.	Dokumentasi Kegiatan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	69
Gambar 3.4.	Dokumentasi Kegiatan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	9
Tabel 1.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	10
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan.....	11
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon	11
Table 2.1	Hubungan hirarki visi,misi, tujuan dan sasaran.....	22
Table 2.2	Tujuan, sasaran dan arah kebijakan	24
Table 2.3	Indikator kinerja utama.....	26
Table 2.4	Sasaran strategis, program dan kegiatan	27
Table 2.5	Perjanjian Kinerja Pokok 2025	30
Table 2.6	Perjanjian kinerja perubahan 2025	31
Table 2.7	Target belanja APBD Perubahan 2025.....	32
Table 3.1	Skala nilai peringkat kerja	34
Table 3.2	Sasaran Strategis Periode Renstra.....	35
Table 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021-2024.....	36
Table 3.4	Capaian Indikator Sasaran I	36
Table 3.5	Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	38
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah.....	39
Tabel 3.7	Perbandingan dengan Target Nasional.....	40
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	43
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
Tabel 3.10	Pengukuran Capaian Kinerja	47
Tabel 3.11	Capaian Indikator Sasaran I	47
Tabel 3.12	Data Konflik Tahun 2025	49
Tabel 3.13	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	50
Tabel 3.14	Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah.....	51
Tabel 3.15	Perbandingan dengan Target Nasional/Daerah Lain.....	52
Tabel 3.16	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	54
Tabel 3.17	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55

Tabel 3.18	Capaian Indikator Sasaran II	59
Tabel 3.19	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak (PILEG dan PILPRES) Tahun 2024	61
Tabel 3.20	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak (Pilkada Tahun 2024)	61
Tabel 3.21	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	62
Table 3.22	Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah.....	63
Tabel 3.23	Perbandingan dengan Target Nasional/Daerah Lain.....	64
Table 3.24	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	65
Tabel 3.25	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	66
Tabel 3.26	Capaian Indikator Sasaran III	70
Tabel 3. 27	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	71
Tabel 3.28	Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah.....	72
Tabel 3.29	Perbandingan dengan Target Nasional/Daerah Lain.....	73
Tabel 3.30	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	74
Tabel 3.31	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	75
Tabel 3.32	Jumlah ormas/LSM/Kelompok Tani/Rumah Ibadah yang Terdata dan Terdaftar Tahun 2021 – 2025	77
Tabel 3.33	Capaian Indikator Sasaran IV.....	79
Tabel 3.34	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya	80
Tabel 3.35	Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah.....	81
Tabel 3.36	Perbandingan dengan Target Nasional/Daerah Lain.....	81
Tabel 3.37	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	84
Tabel 3.38	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	84
Tabel 3.39	Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	86
Table 3.40	Pagu Dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.....	90

Tabel 3.41	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	91
Tabel 3.42	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kerangka tersebut, setiap instansi pemerintah dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerjanya secara terukur dan berorientasi pada hasil.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan ini menjadi landasan utama dalam penerapan manajemen kinerja pemerintahan yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja. Ketentuan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas ini menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ideologi, politik, sosial, budaya, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Kesbangpol

berperan dalam pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan partai politik, serta pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut memerlukan perencanaan dan pengelolaan kinerja yang sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kabupaten Luwu Timur memiliki karakteristik wilayah dan masyarakat yang majemuk dengan dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang dalam menjaga stabilitas daerah sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan daerah, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tidak hanya berpedoman pada visi dan misi daerah, tetapi juga harus selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan pada tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja tersebut mengacu pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2024 sebagai Renstra periode sebelumnya, serta menjadi bagian awal implementasi Rencana Strategis Tahun 2025–2029 yang telah disusun untuk mendukung arah kebijakan pembangunan daerah pada periode selanjutnya.

Selain sebagai instrumen pertanggungjawaban, LKjIP juga berfungsi sebagai sarana evaluasi dan umpan balik dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Badan Kesbangpol di masa mendatang. Evaluasi terhadap capaian kinerja Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan strategi, kebijakan, dan program kerja pada periode Renstra 2025–2029.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi,

dan nepotisme. Penyusunan LKjIP juga diharapkan dapat mendorong keterbukaan informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 merupakan wujud komitmen instansi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja, sekaligus sebagai dasar penilaian atas capaian kinerja yang meliputi visi, misi, sasaran strategis, dan realisasi Indikator Kinerja Utama, guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44270);
3. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025. LKjIP ini disusun sebagai implementasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai instrumen evaluasi kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2024 serta sebagai bagian awal implementasi Rencana Strategis Tahun 2025–2029

1.3.2 TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi capaian kinerja secara terukur dan akuntabel.
2. Menilai pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Mewujudkan pertanggungjawaban kinerja kepada pemangku kepentingan.
4. Menjadi bahan evaluasi dan dasar peningkatan kinerja pada periode berikutnya

1.4. GAMBARAN UMUM BADAN KESBANGPOL

1.4.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur melaksanakan urusan pemerintahan umum, bukan urusan pemerintahan konkuren. Urusan

pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden yang pelaksanaannya di daerah dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota. Dalam pelaksanaannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ruang lingkup urusan pemerintahan umum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka penguatan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, antarumat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan.
4. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan di daerah dalam rangka penyelesaian permasalahan yang timbul.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Sehubungan dengan belum ditetapkan peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi serta pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021. Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menerapkan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara **berAKHLAK** sebagai pedoman perilaku dan budaya kerja aparatur, yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan

Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan ramah kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan rekomendasi izin kegiatan, fasilitasi kegiatan kemasyarakatan, serta penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi

kemasyarakatan. Pelayanan dilakukan dengan mengedepankan sikap sopan, responsif, serta memberikan informasi yang jelas dan terbuka. Selain itu, Badan Kesbangpol terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan layanan berbasis digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.

2. Akuntabel

Nilai Akuntabel diterapkan dengan memastikan setiap proses pelayanan dilaksanakan secara transparan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang berlaku. Setiap aparatur bertanggung jawab atas tugas yang dilaksanakan, mulai dari proses administrasi hingga pengambilan keputusan, serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Pelaporan kegiatan dan penggunaan anggaran dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kompeten

Nilai Kompeten diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan data organisasi kemasyarakatan, serta pemahaman regulasi di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dengan aparatur yang kompeten, pelayanan dapat diberikan secara tepat, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

4. Harmonis

Nilai Harmonis diterapkan dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling menghargai, dan menjunjung tinggi toleransi antarpegawai. Selain itu, Badan Kesbangpol menjalin hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan instansi terkait, guna menciptakan suasana kerja sama yang harmonis dalam menjaga stabilitas dan kerukunan masyarakat.

5. Loyal

Nilai Loyal diwujudkan melalui dedikasi dan komitmen aparatur dalam mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan daerah di atas kepentingan pribadi atau golongan. Aparatur melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan arahan pimpinan, kebijakan pemerintah,

serta standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga netralitas dan stabilitas politik di daerah.

6. Adaptif

Nilai Adaptif diterapkan dengan kemampuan aparaturnya untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan kerja dan perkembangan teknologi. Badan Kesbangpol mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan, seperti penyederhanaan prosedur, pemanfaatan aplikasi digital, serta peningkatan kecepatan layanan, agar dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

7. Kolaboratif

Nilai Kolaboratif diwujudkan melalui kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak, baik perangkat daerah, instansi vertikal, aparat keamanan, maupun elemen masyarakat. Kolaborasi ini dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas politik dan sosial, pencegahan dan penanganan konflik sosial, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan.

1.4.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretaris, para Kepala Bidang dan para kepala sub bagian sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi berikut

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Kesbangpol
Berdasarkan Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2021



1.4.3. SUMBER DAYA KESBANGPOL

1.4.3.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang berperan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur didukung oleh aparatur dan personel sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, yang terdiri atas 11 (sebelas) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 (dua) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 11 (sebelas) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, serta 3 (tiga) orang tenaga Non-ASN, yang terdiri dari 2 (dua) orang petugas kebersihan (cleaning service) dan 1 (satu) orang pengemudi.

Ketersediaan sumber daya manusia tersebut menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Secara lebih rinci data kepegawaian dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, kualifikasi Pendidikan, kepangkatan, serta berdasarkan jabatan struktural. Data sebagaimana dimaksud disajikan dalam tabel-tabel berikut :

A. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	
		Orang	%
1.	Laki-Laki	12	43
2.	Perempuan	16	57
Total		28	100

Sumber : Bagian Umum dan Kepagawaian Badan Kesbangpol

Berdasarkan Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, yang

terdiri atas 12 (dua belas) orang atau 43% berjenis kelamin laki-laki dan 16 (enam belas) orang atau 57% berjenis kelamin perempuan.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai relatif berimbang dengan proporsi pegawai perempuan yang sedikit lebih dominan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur. Keseimbangan tersebut menjadi potensi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1.	Strata Dua (S-2)	3	1	4
2.	Strata Satu (S-1)	6	14	20
3.	SMA/Sederajat	2	1	3
4.	SD/Sederajat	1	0	1
Jumlah		12	16	28

Sumber : Bagian Umum dan Kepagawaian Badan Kesbangpol

Berdasarkan Tabel 1.2, jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebanyak 28 orang dengan dominasi kualifikasi pendidikan Strata Satu (S-1) sebanyak 20 orang (71,43%), yang terdiri atas 6 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Selanjutnya, pegawai dengan kualifikasi Strata Dua (S-2) berjumlah 4 orang (14,29%), terdiri atas 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Pegawai dengan kualifikasi SMA/ sederajat berjumlah 3 orang (10,71%), sedangkan pegawai dengan kualifikasi SD/ sederajat berjumlah 1 orang (3,57%). Komposisi tingkat pendidikan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pegawai telah memiliki pendidikan tinggi, sehingga menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan profesionalisme aparatur dan kualitas pelaksanaan tugas serta fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

C. Berdasarkan Golongan Kepangkatan

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Jenis Kelamin	Gol. IV	Gol. III	Gol. IX (P3K)	Gol. VIII (P3K Paruh Waktu)
1.	Laki-Laki	3	2	4	1
2.	Perempuan	3	5	7	0
Jumlah		6	7	11	1

Sumber : Bagian Umum dan Kepagawaian Badan Kesbangpol

Berdasarkan Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan, komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2025 tersebar pada beberapa golongan kepangkatan. Pegawai dengan Golongan IV berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri atas 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. Pegawai dengan Golongan III berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas 2 (dua) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan.

Selanjutnya, pegawai dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Golongan IX berjumlah 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas 4 (empat) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan. Sementara itu, pegawai dengan status PPPK Paruh Waktu Golongan VIII berjumlah 1 (satu) orang, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.

Komposisi golongan kepangkatan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur berada pada Golongan III dan Golongan IX (PPPK), yang mencerminkan struktur kepegawaian yang produktif dan mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi secara optimal.

C. Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon

Selanjutnya komposisi pegawai (ASN) berdasarkan Jabatan Struktural / Eselonisasi dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel. 1.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon

No.	Jabatan Struktural	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II-B	1 Orang	-	1 Orang
2.	Eselon III-A	-	1 Orang	1 Orang

No.	Jabatan Struktural	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
3.	Eselon III-B	1 Orang	2 Orang	3 Orang
4.	Eselon IV-A	1 Orang	1 Orang	2 Orang
5.	Fungsional	-	-	0 Orang
Jumlah		3 Orang	4 Orang	7 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol

Tabel 1.4 menggambarkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural/eselon sebanyak 7 orang, terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan, yang menunjukkan keterwakilan perempuan sedikit lebih tinggi dalam struktur organisasi.

Jabatan Eselon II-B diisi oleh 1 laki-laki sebagai pimpinan perangkat daerah. Pada Eselon III-A terdapat 1 perempuan, sedangkan Eselon III-B berjumlah 3 orang (1 laki-laki dan 2 perempuan). Untuk Eselon IV-A terdapat 2 orang, masing-masing 1 laki-laki dan 1 perempuan. Sementara itu, jabatan fungsional belum terisi.

Secara umum, formasi jabatan struktural telah terpenuhi untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi, namun pengisian jabatan fungsional masih perlu menjadi perhatian guna memperkuat kapasitas kelembagaan.

1.4.3.2. SARANA DAN PRASARANA

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Kondisi sarana dan prasarana kerja yang sekaligus asset perlengkapan yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 1.5
Daftar Sarana/Prasarana Kantor dan Kondisinya
Per 31 Desember 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Software	1 Unit	Baik
2	AC. Window	1 Unit	Rusak Berat/Usang
3	Camera Video	1 Unit	Rusak Berat/Usang
4	Digital Audio Taperecorder	1 Unit	Rusak Berat/Usang
5	Dispenser	1 Unit	Rusak Berat/Usang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
6	Facsimile	2 Unit	Rusak Berat/Usang
7	Filing Cabinet Besi	2 Unit	Rusak Berat/Usang
8	Gordyin/Kray	37 Buah	Rusak Berat/Usang
9	Handy Camp	1 Unit	Rusak Berat/Usang
10	Handy Talky (HT)	2 Unit	Rusak Berat/Usang
11	Hard Disk	3 Unit	Rusak Berat/Usang
12	Kipas Angin	2 Unit	Rusak Berat/Usang
13	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	2 buah	Rusak Berat/Usang
14	Kursi Putar	3 buah	Rusak Berat/Usang
15	Kursi Rapat	5 buah	Rusak Berat/Usang
16	Kursi Tamu	1 Buah	Rusak Berat/Usang
17	Laptop	4 Unit	Rusak Berat/Usang
18	Layar Film/Projector	1 Unit	Rusak Berat/Usang
19	Lemari Kayu	1 buah	Rusak Berat/Usang
20	Lensa Kamera	1 Unit	Rusak Berat/Usang
21	Meja 1/2 Biro	1 buah	Rusak Berat/Usang
22	Mesin Absensi	1 Unit	Rusak Berat/Usang
23	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	1 Unit	Rusak Berat/Usang
24	Mesin Ketik Manual Standar (14-16 Inchi)	3 Unit	Rusak Berat/Usang
25	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit	Rusak Berat/Usang
26	Micro Film	1 Unit	Rusak Berat/Usang
27	Note Book	1 Unit	Rusak Berat/Usang
28	P.C Unit	3 Unit	Rusak Berat/Usang
29	Papan Pengumuman	3 Buah	Rusak Berat/Usang
30	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1 Unit	Rusak Berat/Usang
31	Pesawat Telephone	1 Unit	Rusak Berat/Usang
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8 Unit	Rusak Berat/Usang
33	Uninterrupted Power Supply (UPS)	4 Unit	Rusak Berat/Usang
34	Wireless	1 Unit	Rusak Berat/Usang
35	P.C Unit	3 Unit	Rusak Berat/Usang
36	Laptop	27 Unit	4 Unit rusak Berat, 23 Unit Baik
37	Note Book	1 Unit	Rusak Berat/Usang
38	Tablet PC	1 Unit	Baik

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
39	Hard Disk	1 Unit	Baik
40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16 Unit	8 Unit Rusak Berat, 8 Unit Baik
41	External/Portable hardisk	2 Unit	Baik
42	Peralatan Jaringan Lainnya	1 Unit	Baik
43	Station Wagon	9 Buah	Baik
44	Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 Orang)	1 Unit	Baik
45	Mini Bus (penumpang 14 Orang Ke bawah)	2 Unit	Baik
46	Sepeda Motor	3 Unit	Baik
47	Scanner (Universal Tester)	1 Unit	Baik
48	Lemari besi/Metal	4 Buah	Baik
49	Lemari Kayu	5 Buah	1 Buah Rusak Berat, 4 Buah Baik
50	Rak Besi	1 Buah	Baik
51	Rak Kayu	1 Buah	Baik
52	Filing Cabinet Besi	9 Buah	2 Unit Rusak Berat, 7 Unit Baik
53	Brankas	2 Unit	Baik
54	Lemari Kaca	2 Buah	Baik
55	CCTV - Camera Control Television System	8 Unit	Rusak Berat
56	LCD Projector/Infocus	1 Unit	Baik
57	Papan Pengumuman	20 Buah	3 Buah Rusak Berat, 17 Buah Baik
58	Teralis	71 Buah	Baik
59	Alat Kantor Lainnya	1 Buah	Baik
60	Meja Kerja kayu	3 Buah	Baik
61	Kursi besi / Metal	1 Unit	Baik
62	Meja Rapat	3 Buah	Baik
63	Meja Podium	2 Buah	Baik
64	Meja 1/2 Biro	14 Buah	1 Buah Rusak Berat, 13 Buah Baik
65	Kursi Rapat	102 Buah	5 Buah Rusak Berat, 97 Buah Baik
66	Kursi Tamu	1 buah	Rusak Berat
67	Kursi Putar	4 Buah	Kursi Putar 3 Buah Rusak Berat, 1 Buah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
			Baik
68	Bangku Tunggu	1 Buah	Baik
69	Kursi Lipat	20 Buah	Baik
70	Meja Komputer	4 Buah	Baik
71	Sofa	2 Set	Baik
72	Mesin Pemotong Rumput	2 Unit	1 Unit Rusak Berat, 1 Unit Baik
73	Lemari Es	2 Buah	Baik
74	A.C. Window	2 Unit	1 Unit Rusak Berat, 1 Unit Baik
75	A.C. Split	9 Unit	Baik
76	Kipas Angin	7 buah	2 buah Rusak Berat, 4 buah Baik
77	Alat Dapur Lainnya	3 Buah	Baik
78	Televisi	1 Buah	Baik
79	Loudspeaker	2 Unit	Baik
80	Sound System	1 Unit	Baik
81	Wireless	1 Unit	Rusak Berat
82	Microphone	1 Unit	1 Unit Rusak Berat
83	Camera Film	1 Unit	Baik
84	Tustel	1 Unit	Rusak Berat
85	Tiang Bendera	1 Buah	Baik
86	Tangga Aluminium	1 Buah	Baik
87	Dispenser	3 Buah	1 Unit Rusak berat, 2 Buah Baik
88	Mimbar/Podium	3 Buah	Baik
89	Karpet	1 Buah	Baik
90	Gordyin/Kray	42 Buah	37 rusak Berat, 5 Baik
91	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	1 Unit	Baik
92	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	Baik
93	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3 Buah	Baik
94	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6 Buah	Baik
95	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 Buah	Baik
96	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6 Buah	Baik
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2 Buah	Baik

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
98	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2 Buah	Baik
99	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	5 Buah	2 Buah Rusak Berat, 3 Buah Baik
100	Microphone/Wireless MIC	1 Unit	Baik
101	Digital Audio Taperecorder	1 Unit	Rusak Berat
102	Peralatan Studio Audio Lainnya (dst)	1 Unit	Baik
103	Facsimile	1 Buah	Rusak Berat
104	Peralatan Antena Penerima vhf lainnya	1 Unit	Baik
105	Genset	1 Unit	Baik
106	Timbangan Badan	2 Buah	Baik
107	Ukur Tinggi Badan	2 Buah	Baik
108	Proyektion Polariscope	1 Unit	Baik
109	Lambang Negara (Garuda)	2 Buah	Baik
110	Gedung Kantor	1 Unit	Baik

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, kondisi barang milik daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, sebagian besar aset masih dalam kondisi baik dan layak digunakan, meskipun terdapat sejumlah barang yang sudah mengalami kerusakan ringan maupun berat. Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan aset yang lebih optimal melalui pemeliharaan rutin, rehabilitasi, serta pengadaan barang baru sesuai kebutuhan, agar sarana prasarana tetap mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan

1.5. ISU-ISU STRATEGIS

Kabupaten Luwu Timur sebagai daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan keberagaman etnis, memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, dinamika sosial yang ditimbulkan oleh pesatnya pertumbuhan sektor industri, mobilitas penduduk antarwilayah, serta perbedaan latar belakang budaya dan kepentingan politik turut menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas dan integrasi sosial.

Isu strategis diidentifikasi sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah, dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan

menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Secara umum terdapat beberapa masalah / isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

1. Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat Partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya belum optimal
2. Adanya potensi intoleransi dan radikalisme
3. Lemahnya pembinaan dan pengawasan ormas
4. Terjadinya konflik horizontal dan lemahnya sinergi dalam deteksi dini konflik
5. Belum optimalnya kemitraan dan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah
6. Rendahnya kepatuhan parpol dalam pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik
7. Belum optimalnya pengawasan terhadap WNA
8. Meningkatnya ancaman narkoba

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja yang memuat hal-hal sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum mengenai organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan Renstra 2021 - 2026 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target Indikator Kinerja Utama (IKU) lima tahun yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dari aspek :

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional jika ada;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan rencana anggaran yang akan digunakan dan yang anggaran telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah dan solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan instrumen yang digunakan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan realisasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP), serta menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis (Renstra), karena pada dasarnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra.

Perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dalam periode pelaporan kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menggunakan dua periode Renstra, yaitu:

1. Renstra Tahun 2021–2024, yang disusun sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur periode sebelumnya; dan
2. Renstra Tahun 2025–2029, yang disusun sebagai penjabaran RPJMD periode berjalan.

Kedua dokumen Renstra tersebut menjadi landasan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja (Renja), serta penganggaran tahunan. Substansi Renstra tetap berorientasi pada pencapaian keluaran (output) dan hasil (outcome) yang terukur, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

2.1.1. Visi

Perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur mengacu pada visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD pada masing-masing periode kepemimpinan kepala daerah.

Pada periode Tahun 2021–2024, visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur adalah

V I S I
**”LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN
NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**

Visi tersebut menekankan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan (sustainable development), peningkatan kemajuan daerah di berbagai sektor, serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, visi ini diwujudkan melalui penguatan wawasan kebangsaan, pembinaan ideologi Pancasila, peningkatan partisipasi politik masyarakat, serta pemeliharaan stabilitas dan ketertiban umum yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal.

Selanjutnya, pada periode Tahun 2025–2029, visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur adalah:

V I S I
”LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi ini mengandung makna terwujudnya kemajuan daerah yang ditandai dengan tata kelola pemerintahan yang efektif, stabilitas sosial politik yang kondusif, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam mendukung visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam menjaga stabilitas politik daerah, meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat, memperkuat ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan, serta mencegah dan menangani potensi konflik sosial.

Secara substantif, kedua visi tersebut memiliki kesinambungan arah pembangunan. Jika pada periode sebelumnya ditekankan pada pembangunan yang berkelanjutan dan berlandaskan nilai agama serta budaya, maka pada periode berikutnya diarahkan pada penguatan hasil pembangunan menuju kemajuan dan kesejahteraan yang lebih nyata. Dalam konteks tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas politik daerah, memperkuat ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan, serta menciptakan kondisi sosial yang kondusif bagi keberlanjutan pembangunan.

2.1.2. Misi

Perencanaan dan pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur mengacu pada misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah.

Periode Tahun 2021–2024

Pada periode Tahun 2021–2024, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menetapkan enam misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat; dan
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dari keenam misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengampu **Misi ke-6**, yang menekankan pentingnya pembangunan yang berlandaskan nilai agama dan budaya. Dalam mendukung misi ini, Badan Kesbangpol berperan dalam memperkuat wawasan kebangsaan, membina kehidupan politik yang demokratis dan beretika, menjaga stabilitas daerah, serta mendorong harmonisasi sosial sebagai fondasi keberlanjutan pembangunan.

Periode Tahun 2025–2029

Selanjutnya, pada periode Tahun 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menetapkan lima misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan;
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

yang terintegrasi; dan

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital.

Pada periode ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengampu **Misi ke-1**, yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing. Peran Kesbangpol diwujudkan melalui penguatan pendidikan politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik, penanaman nilai kebangsaan, serta pencegahan potensi konflik sosial guna membentuk masyarakat yang berkualitas secara karakter dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun sebagai penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah. Tujuan disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar dalam penetapan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan visi, misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2024 dan periode tahun 2025-2029.

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Hubungan Hierarkis Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur

PERIODE TAHUN 2021 - 2024				PERIODE TAHUN 2025 - 2029			
VISI	MISI	TUJUAN PD	SASARAN PD	VISI	MISI	TUJUAN PD	SASARAN PD
Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya	Menjamin keberlanjutan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M-6)	1. Meningkatkan Peran FKUB dalam membangun Kerukunan beragama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan	1. Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis 2. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum	Luwu Timur Maju dan Sejahtera	Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing (M-1)	Meningkatnya kerukunan umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi	1. Meningkatnya stabilitas dan kondusifitas daerah 2. meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada 3. Meningkatnya peran ormas dalam

PERIODE TAHUN 2021 - 2024				PERIODE TAHUN 2025 - 2029			
VISI	MISI	TUJUAN PD	SASARAN PD	VISI	MISI	TUJUAN PD	SASARAN PD
		hak pilihnya 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD				pembangunan daerah 4. meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel tersebut menunjukkan hubungan hierarkis antara visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur pada dua periode RPJMD. Setiap komponen disusun secara berjenjang, dimulai dari visi sebagai arah pembangunan daerah, yang dijabarkan ke dalam misi, kemudian diturunkan menjadi tujuan perangkat daerah, dan dioperasionalkan melalui sasaran strategis yang terukur.

Pada periode 2021–2024, visi pembangunan dijabarkan melalui Misi ke-6 yang diampu Badan Kesbangpol, yang kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan peningkatan kerukunan beragama, partisipasi demokrasi, dan akuntabilitas kinerja, serta diwujudkan melalui sasaran yang terukur. Selanjutnya, pada periode 2025–2029, visi baru dijabarkan melalui Misi ke-1, yang diturunkan menjadi tujuan peningkatan kualitas kehidupan sosial politik masyarakat, dengan sasaran berupa peningkatan stabilitas daerah, partisipasi politik, peran organisasi kemasyarakatan, dan akuntabilitas perangkat daerah.

Meskipun terdapat perubahan visi dan misi antar periode, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap konsisten dalam menjaga stabilitas, memperkuat demokrasi, membangun kerukunan, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel sebagai fondasi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Luwu Timur.

2.1.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menetapkan strategi dan kebijakan yang digambarkan pada table berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur

Periode Renstra Tahun 2021 - 2024				Periode Renstra Tahun 2025 - 2029			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Peran FKUB dalam membangun Kerukunan beragama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	1. Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis 2. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	1. Penguatan wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama, dan sistem kewaspadaan dini konflik sosial. 2. Penguatan pendidikan politik dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah. 3. Penguatan pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja dan akuntabilitas.	1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, toleran, dan kondusif melalui pembinaan ideologi Pancasila serta pencegahan potensi konflik. 2. Mendorong partisipasi politik masyarakat yang sadar, aktif, dan bertanggung jawab dalam pembangunan. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Meningkatnya kerukunan umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi	1. Meningkatnya stabilitas dan kondusifitas daerah 2. meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada 3. Meningkatnya peran ormas dalam pembangunan daerah 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Penguatan sistem kewaspadaan dini dan sinergi lintas sektor dalam pencegahan serta penanganan konflik sosial. 2. Penguatan pendidikan politik dan fasilitasi demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan 3. Penguatan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan berbasis data dan kolaborasi. 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan digitalisasi sistem manajemen	1. Meningkatkan stabilitas daerah melalui deteksi dini, koordinasi terpadu, dan penguatan ketahanan nasional di daerah. 2. Mendorong partisipasi politik masyarakat yang sadar, cerdas, dan bertanggung jawab. 3. Mengembangkan sistem pembinaan ormas yang tertib administrasi, aktif, dan berkontribusi terhadap persatuan bangsa. 4. Mewujudkan pengelolaan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Sumber : Dokumen Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021 – 2026 dan Tahun 2025 - 2029

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menunjukkan kesinambungan dan peningkatan kualitas perencanaan antara periode Renstra 2021–2024 dan 2025–2029. Pada periode 2021–2024, fokus kebijakan diarahkan pada pembinaan kerukunan umat beragama, peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, serta penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui pendekatan pembinaan dan pelaksanaan program berbasis kinerja.

Pada periode 2025–2029, arah kebijakan berkembang menjadi lebih strategis dengan penekanan pada penguatan sistem kewaspadaan dini dan sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas daerah, penguatan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan peran organisasi kemasyarakatan, serta tata kelola berbasis kinerja dan digitalisasi. Perubahan ini mencerminkan peningkatan dari pendekatan pembinaan menuju penguatan sistem dan tata kelola yang lebih terintegrasi dan akuntabel.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan periode Renstra yang berlaku. Pada periode Renstra Tahun 2021–2024, Penetapan Kinerja menjadi instrumen untuk memastikan tercapainya sasaran strategis terkait kerukunan umat beragama, partisipasi politik masyarakat, dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tahun 2025 merupakan tahun akhir evaluasi capaian periode tersebut.

Selanjutnya, pada periode Renstra Tahun 2025–2029, Penetapan Kinerja disesuaikan dengan arah kebijakan dan strategi yang lebih sistematis, yaitu penguatan stabilitas daerah, demokrasi yang inklusif, peran organisasi kemasyarakatan, serta tata kelola berbasis kinerja dan digitalisasi. Dengan demikian, kedua periode tersebut menunjukkan kesinambungan perencanaan sekaligus peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun 2021 – 2024							Tahun 2025 - 2026							
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan				
			2022	2023	2024	2025				2025	2026	2027	2028	2029
Terciptanya kerukunan umat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Persen	75,89	75,92	76	76,34	Meningkatnya stabilitas dan kondusifitas daerah	Persentase Penurunan konflik IPOLEKSOS BUD	Persen	18,18	27,27	36,36	54,55	63,64
Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan lokal	Persen	80,46	80,46	81,00	81,00	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	Tingkat partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	Persen	80,35	80,35	80,35	80,35	81,50
							Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan daerah	Persentase ormas dalam pembangunan daerah	Persen	52	54	56	59	61
							Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai	70 (BB)	70,50 (BB)	71 (BB)	71,50 (BB)	72 (BB)

Sumber Data : Dokumen IKU Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025 – 2029

Tabel diatas menunjukkan target kinerja Badan Kesbangpol pada dua periode perencanaan. Pada periode 2021–2024, sasaran strategis difokuskan pada peningkatan kerukunan umat beragama yang diukur melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dengan target yang meningkat secara bertahap setiap tahun, serta peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu nasional dan lokal yang dipertahankan pada kisaran 80–81 persen.

Selanjutnya, pada periode 2025–2029, sasaran strategis diarahkan pada peningkatan stabilitas dan kondusifitas daerah yang diukur melalui persentase penurunan konflik IPOLEKSOSBUD dengan target peningkatan yang progresif, peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada, peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang diukur melalui nilai SAKIP

sesuai evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Secara keseluruhan, arah kebijakan menunjukkan kesinambungan pembangunan dengan penekanan pada stabilitas daerah, partisipasi masyarakat, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

2.3. STRATEGI PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada dua periode Renstra, setelah penetapan tujuan dan sasaran strategis, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi sebagai arah kebijakan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Strategi tersebut menjadi pedoman dalam menentukan program dan kegiatan yang relevan, terukur, dan selaras dengan indikator kinerja pada masing-masing periode perencanaan.

Pada periode Renstra 2021–2024, strategi difokuskan pada penguatan kerukunan umat beragama dan peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui pelaksanaan program kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan, serta pendidikan politik. Sementara itu, pada periode Renstra 2025–2029, strategi diarahkan secara lebih komprehensif pada peningkatan stabilitas dan kondusifitas daerah, penguatan peran organisasi kemasyarakatan, peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dengan demikian, pada kedua periode tersebut, strategi diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah tetap konsisten, berkesinambungan, dan berorientasi pada hasil kinerja.

Tabel 2.4
Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PERIODE TAHUN 2021 – 2024				PERIODE TAHUN 2025 - 2029			
SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
1. Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Meningkat nya stabilitas dan kondusifitas daerah	Persentase Penurunan konflik IPOLEKSOS BUD	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

PERIODE TAHUN 2021 – 2024				PERIODE TAHUN 2025 - 2029			
SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
		1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
1. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan lokal	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik, Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik	2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	Tingkat partisipasi Pemilu dan Pilkada	Program Peningkatan Peran Partai Politik, Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik
		2. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3. Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan daerah	Persentase ormas dalam pembangunan daerah	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai Sakip	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
			2. Administrasi keuangan perangkat daerah				2. Administrasi keuangan perangkat daerah
			3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
			4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah				4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
			5. Administrasi umum perangkat daerah				5. Administrasi umum perangkat daerah
			6. Pengadaan				6. Pengadaan

PERIODE TAHUN 2021 – 2024				PERIODE TAHUN 2025 - 2029			
SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
			barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
			7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
			8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan				8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Bupati Luwu Timur selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja (PK) Pokok
Badan Kesbangpol Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80.47%
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal	82.39%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai SAKIP	78.65

PROGRAM		ANGGARAN	KET
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.734.547.500,-	APBD
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	594.943.00,-	APBD
3.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.415.345.100,-	APBD
4.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.319.768.265,-	APBD
5.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	67.742.000,-	APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.281.107.812,-	APBD
Jumlah		8.413.453.677,-	APBD

Sumber : Dok. Perjanjian Kinerja Pokok Tahun 2025

Pada tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dokumen Rencana Strategis

(Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 yang memuat perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja. Selain itu, perubahan Perjanjian Kinerja juga dilakukan sebagai tindak lanjut atas adanya perubahan alokasi anggaran pada tahun berjalan, sehingga diperlukan penyesuaian target kinerja agar tetap selaras dengan perencanaan strategis dan kemampuan pendanaan yang tersedia. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan
Badan Kesbangpol Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah	Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	18,18%
2.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	80,35%
3.	Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Persentase Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah	52%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	70 (BB)

PROGRAM		ANGGARAN	KET
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.642.396.800,-	APBD-P
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	577.235.000,-	APBD-P
3.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.432.799.600,-	APBD-P
4.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.238.202.265,-	APBD-P

PROGRAM		ANGGARAN	KET
5.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	77.664.400,-	APBD-P
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.789.876.609,-	APBD-P
Jumlah		8.758.174.674,-	APBD-P

Sumber : Dok. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

2.5. PERENCANAAN ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Luwu Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp 8.413.453.677** dengan rincian **belanja operasi Rp 8.165.703.677,-** dan **belanja modal Rp 247.750.000,-** sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2024⁵ tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025, menjadi sebesar **Rp. 8.758.174.674**, dengan rincian **belanja Rp. 7.809.113.674** dan **belanja modal Rp 949.061.000,-**. Target belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 termuat dalam Tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7

Target Belanja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur APBD Perubahan Tahun 2025

NO	BELANJA	TARGET (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2	3	5
1	Belanja Operasi	7.809.113.674,-	89,16
	Belanja Pegawai	2.067.704.566,-	26,48
	Belanja Barang dan Jasa	4.441.344.843,-	56,87
	Belanja Hibah	1.300.064.265,-	16,65
2	Belanja Modal	949.061.000,-	10,84
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	949.061.000,-	100
Total		8.758.174.674,-	100

Sumber : DPA-P Badan Kesbangpol Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA BADAN KESBANGPOL

Capaian kinerja organisasi merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyajian capaian kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2025 berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai pada tahun berjalan. Proses pengukuran tersebut didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Melalui pengukuran kinerja ini dapat diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pada Tahun 2025, pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan dalam masa transisi perencanaan strategis, yaitu dari Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2021–2024 menuju Renstra periode Tahun 2025–2029. Sehubungan dengan hal tersebut, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilakukan penyesuaian untuk mengakomodasi perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra periode Tahun 2025–2029. Selain itu, penyesuaian juga dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan alokasi anggaran pada tahun berjalan sehingga target kinerja yang ditetapkan tetap realistis dan selaras dengan kemampuan pendanaan yang tersedia.

Hasil pengukuran capaian kinerja organisasi selanjutnya disajikan dalam bentuk perbandingan antara target dan realisasi pada masing-masing indikator kinerja. Terhadap capaian tersebut dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, baik faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Melalui penyajian dan analisis capaian kinerja ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur selama Tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi bahan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pada periode berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja Akuntabilitas Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

3.2. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Sasaran strategis tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaiannya. Penetapan sasaran strategis mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, baik periode Tahun 2021–2024 maupun periode Tahun 2025–2029, sehingga pelaksanaan kinerja organisasi tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Berikut tabel sasaran strategis pada masing-masing periode renstra.

Tabel 3,2

Sasaran Strategis Periode Renstra

Renstra Tahun 2021 – 2024			Renstra Tahun 2025 – 2029		
No	Sasaran Strategis	Indikator	No	Sasaran Strategis	Indikator
1.	Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	1.	Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah	Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal.	2.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada.
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai SAKIP	3.	Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Persentase Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah
			4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP

Berdasarkan perbandingan kedua periode Renstra, sasaran strategis terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama pada Renstra Tahun 2021–2024 tidak lagi muncul secara eksplisit pada Renstra Tahun 2025–2029 karena cakupannya telah diperluas menjadi meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah dengan indikator persentase penurunan konflik IPOLEKSOSBUD.

Sementara itu, sasaran terkait partisipasi politik masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah tetap dilanjutkan pada periode Renstra 2025–2029 dengan penyesuaian redaksi. Oleh karena itu, pada periode Tahun 2021–2024 pembahasan difokuskan pada capaian kinerja sasaran strategis terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis, sedangkan dua sasaran strategis lainnya akan dijelaskan pada pembahasan periode Renstra 2025–2029.

3.3. Renstra Periode Tahun 2021 - 2024

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1.	Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	80,47%	80,84%	100,46%	Sangat Tinggi

SASARAN

“ TERCIPTANYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA YANG HARMONIS “

➤ ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

3.3.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3.4.

Capaian Indikator Sasaran I

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)	80,47%	80,84%	100,46%

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut, Sasaran Kinerja “Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis” diukur melalui indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Pada tahun pelaporan, target IKUB yang ditetapkan sebesar 80,47%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 80,84%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,46% atau telah melampaui target yang ditetapkan.

Formula untuk mengukur capaian kinerja indikator tersebut adalah

$$IKUB = \frac{1}{3} (IT + IK + IS)$$

IT = Indkes Toleransi
 IK = Indeks Kesetaraan
 IS = Indeks Kerja Sama

$$\text{IKUB} = 1/3 (80,21\% + 82,36\% + 79,96\%)$$

$$= 1/3 (242,53\%)$$

$$\text{Realisasi} = 80,84\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 80,84\% / 80,47\% = 100,46\%$$

Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2025 yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Pengukuran dilakukan pada 11 kecamatan di wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan metode multistage random sampling, sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi kerukunan umat beragama secara representatif di masyarakat.

Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kehidupan beragama di Kabupaten Luwu Timur berada pada kategori baik dan harmonis, yang tercermin dari sikap saling menghormati antar pemeluk agama, terjaganya toleransi, serta minimnya konflik yang berlatar belakang perbedaan agama. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya pemerintah daerah melalui pembinaan kehidupan beragama, fasilitasi dialog antar umat beragama, serta penguatan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga suasana yang kondusif di tengah masyarakat yang beragam.

Dengan tercapainya nilai IKUB yang melampaui target, dapat disimpulkan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama telah memberikan kontribusi positif terhadap terpeliharanya harmoni sosial di masyarakat. Ke depan, upaya-upaya tersebut perlu terus diperkuat agar kondisi kerukunan yang telah terbangun dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mendukung stabilitas daerah dan kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga kerukunan, keamanan, dan ketentraman di Kabupaten Luwu Timur melakukan berbagai upaya diantaranya meredam potensi konflik, membangun system peringatan dini, memelihara kondisi damai dalam masyarakat dan melakukan sosialisasi kerukunan umat beragama. Dalam meredam potensi konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur telah berupaya

mengintensifkan dialog, koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait, kelompok masyarakat (alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda), membangun karakter bangsa, melestarikan nilai Pancasila dan kearifan local, Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika, Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Dalam membangun sistem peringatan dini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur melakukan berbagai upaya diantaranya pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.3.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Selanjutnya, target dan realisasi kinerja sasaran strategis **terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis** dengan indikator kinerja **Indeks Kerukunan Umat Beragama** tahun 2025 dengan beberapa tahun lalu dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.5

Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terciptanya kerukunan umat beragama yang hamonis	Indeks Kerukunan umat beragama (IKUB)	2022	75,89%	0%	0%
		2023	75,92%	79,46%	104,66%
		2024	79,46%	80,47%	101,27%
		2025	80,47%	80,84%	100,46%

Berdasarkan tabel capaian kinerja pada sasaran “Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis” dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), dapat dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2022, target IKUB ditetapkan sebesar 75,89%, namun realisasi belum tersedia (0%) sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung. Hal ini

umumnya disebabkan karena pengukuran indeks belum dilaksanakan atau belum dilakukan kerja sama survei pada tahun tersebut, sehingga data capaian belum dapat disajikan.

Pada tahun 2023, target IKUB sebesar 75,92% berhasil dilampaui dengan realisasi 79,46%, sehingga capaian kinerja mencapai 104,66%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kerukunan umat beragama di masyarakat berada pada kondisi yang lebih baik dari target yang direncanakan, yang mencerminkan semakin kuatnya toleransi, keharmonisan, dan hubungan sosial antar umat beragama.

Selanjutnya pada tahun 2024, target IKUB sebesar 79,46% juga berhasil terlampaui dengan realisasi 80,47%, sehingga capaian kinerja mencapai 101,27%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan, fasilitasi dialog antar umat beragama, serta koordinasi dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan terus memberikan dampak positif terhadap peningkatan kerukunan masyarakat.

Pada tahun 2025, target IKUB sebesar 80,47% kembali dapat dilampaui dengan realisasi 80,84%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,46%. Meskipun peningkatan realisasi tidak terlalu besar dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama tetap terjaga secara stabil dan konsisten berada di atas target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama selama periode tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik, ditandai dengan realisasi yang selalu melampaui target sejak tahun 2023 hingga 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program dan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama yang dilaksanakan telah berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas sosial serta memperkuat toleransi dan keharmonisan kehidupan beragama di masyarakat.

3.3.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.6

Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah

SASARAN I : TERCIPTANYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA YANG HARMONIS				% CAPAIAN S/D 20245 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
INDIKATOR KINERJA SASARAN : "INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB)	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISIASI TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR RENSTRA (%)	
	80,47	80,84	76,85	105,19%

Berdasarkan Tabel 3 tentang Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah pada Sasaran :Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis" dengan indikator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), diketahui bahwa target kinerja pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 80,47, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 80,84.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 76,85, maka capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 105,19% terhadap target jangka menengah. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator IKUB pada tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menggambarkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di daerah berada pada kategori baik, yang ditunjukkan dengan terpeliharanya hubungan yang harmonis antarumat beragama serta meningkatnya sikap toleransi di tengah masyarakat. Keberhasilan ini juga didukung oleh berbagai upaya yang dilakukan melalui pembinaan kerukunan umat beragama, penguatan koordinasi dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan kehidupan yang rukun dan damai.

3.3.4. PERBANDINGAN DENGAN TARGET NASIONAL ATAU DAERAH LAIN

Tabel 3.7

Perbandingan dengan Target Nasional

SASARAN : TERCIPTANYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA YANG HARMONIS			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISIASI	REALISASI NASIONAL
"Indeks Kerukunan Umat Beragama	TAHUN 2025 (%)	TAHUN 2025 (%)	
	80,47	80,84	77,89

Berdasarkan Tabel 3 tentang Perbandingan dengan Target Nasional pada Sasaran: Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis di Kabupaten Luwu Timur dengan indikator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), diketahui bahwa target kinerja tahun 2025 ditetapkan sebesar 80,47, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 80,84.

Jika dibandingkan dengan realisasi nasional sebesar 77,89, maka capaian IKUB di Kabupaten Luwu Timur berada di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Luwu Timur berada pada kondisi yang baik dan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama telah berjalan secara efektif. Hal ini didukung oleh berbagai kegiatan pembinaan, penguatan koordinasi dengan tokoh agama, serta peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga toleransi, saling menghormati, dan kehidupan sosial yang harmonis. Dengan kondisi tersebut, diharapkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Luwu Timur dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

3.3.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

SASARAN

Beberapa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis dengan indicator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yaitu :

Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan moderasi beragama kepada masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama FKUB Kabupaten Luwu Timur.

1. Terjalinnnya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait dalam mendukung program kerukunan dan moderasi beragama.
2. Terbentuk dan berfungsinya forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur seperti FKDM, FKUB, FPK, FKBN, Tim Informan, Tim P4GN, dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan deteksi dini terhadap potensi permasalahan di masyarakat.
3. Koordinasi yang intensif dengan Forkopimda dan instansi terkait dalam mengantisipasi potensi konflik serta menjaga stabilitas dan kerukunan umat beragama.
4. Konsolidasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam melakukan deteksi dini, pencegahan konflik, serta menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terkait nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, serta regulasi yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.
2. Adanya pengaruh informasi yang tidak benar (hoaks) dan isu-isu provokatif,

khususnya melalui media sosial, yang berpotensi memicu kesalahpahaman dan gesekan di masyarakat.

3. Belum meratanya pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kerukunan umat beragama kepada seluruh lapisan masyarakat.
4. Kondisi masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang heterogen, sehingga berpotensi menimbulkan gesekan sosial yang dapat mempengaruhi tingkat kerukunan.
5. Keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pembinaan, deteksi dini, serta koordinasi dengan pihak terkait.
6. Masih adanya potensi konflik sosial yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, maupun kepentingan kelompok tertentu..

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

1. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terkait nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, serta regulasi yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Forkopimda, dalam rangka menjaga stabilitas daerah dan mengantisipasi potensi konflik sosial.
3. Memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta forum-forum strategis lainnya yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga kerukunan serta meminimalisir potensi gesekan di masyarakat.
4. Mengoptimalkan fungsi Tim Informan dan forum kewaspadaan dini untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang dapat terjadi di masyarakat.
5. Melaksanakan pemantauan serta rapat koordinasi secara berkala guna mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat secara cepat dan terkoordinasi.
6. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan sosialisasi, pemantauan, serta pemberdayaan forum-forum strategis dalam menjaga kerukunan umat beragama.

3.3.6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik sumber daya sarana, prasarana maupun tenaga dalam menunjang pencapaian kinerja terhadap sasaran “Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis” maka dapat difasilitasi dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan forum-forum strategis yang telah terbentuk, memaksimalkan fungsi Tim Informan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Melakukan koordinasi lintas sectoral dan memasang papan himbauan untuk tetap menjaga kerukunan dan kedamaian dimasyarakat.

Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terciptanya Kerukunan Umat Beragama		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80,47%	80,84%	100,46%	577.235.000	549.798.450	95.25%
	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang dilaksanakan (%)	100%	100%	100%	577.235.000	549.798.450	95.25%

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.9

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat efisiensi Anggaran
Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)	100,46%	95.25%	4.75%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisensi anggaran terhadap pencapaian kinerja indicator “Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)” adalah 4,75%

**3.3.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG
KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN**

Tercapainya target kinerja sasaran terciptnya kerukunan umat beragama yang harmonis dengan indicator kinerja “**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**” ini tidak bisa lepas dari tercapainya program,kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagai pendukung sasaran. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sasaran kinerja program yaitu Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Dengan indikator Persentase Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang dilaksanakan.

Formula indikatornya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang EKOSOSBUD (\%)} &= \text{Jumlah Kebijakan yang dilaksanakan} \div \text{Jumlah Kebijakan yang Ditargetkan} \times 100\% \\
 &= 4 \text{ Kebijakan dilaksanakan} / 4 \text{ kebijakan ditargetkan} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Indikator Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya digunakan untuk mengukur tingkat pelaksanaan kebijakan yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Pada Tahun 2025 ditargetkan 4 kebijakan untuk dilaksanakan dan seluruhnya dapat

direalisasikan sehingga capaian indikator mencapai 100%.

Kebijakan yang dilaksanakan meliputi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, fasilitasi penguatan kerukunan umat beragama, pelaksanaan pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), serta penetapan SK Bupati tentang pemberian hibah anggaran kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh kebijakan yang direncanakan dalam mendukung penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat telah terlaksana sesuai target, sehingga turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial di Kabupaten Luwu Timur.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah

3.3.8. KESIMPULAN

- ❖ Capaian kinerja sasaran strategis “Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis” dengan indikator kinerja “**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)** yaitu 100,45% diperoleh dengan rumus perhitungan “

$$= \frac{\text{Realisasi IKUB}}{\text{Target IKUB}} \times 100\%$$

$$= \frac{80,84}{80,47} \times 100\%$$

$$= 100,46\%$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : Rp. 577.235.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 549.798.450 atau 95,25%.

Gambar 3.1.
Dokumentasi Kegiatan “Program Pembinaan dan Pengembangan
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya”



Dokumentasi Kegiatan “Coaching Pendahuluan IKUB”



Dokumentasi Kegiatan “Expose Akhir Hasil IKUB Tahun 2025”

3.4. Renstra Tahun 2025 - 2029

Tabel 3.10

Pengukuran Capaian Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah	Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	18,18%	72,72%	400%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pilkada	80,35%	80,35%	100%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan daerah	Persentase Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah	52%	54,48%	104,77%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,00 (BB)	80,00 (BB)	114,28%	Sangat Tinggi

3.4.1. SASARAN - 1

“ MENINGKATNYA STABILITAS DAN KONDUSIVITAS DAERAH “

➤ ANALILIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

3.4.1.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3.11

Capaian Indikator Sasaran I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya stabilitas dan kondusifitas daerah	Persentase penurunan konflik ipoleksosbud	18,18%	72,72%	400%

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa, sasaran strategis Meningkatnya stabilitas dan kondusifitas daerah diukur melalui indikator kinerja Persentase penurunan konflik IPOLEKSOSBUD. Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 18,18%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 72,72%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 400% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi stabilitas daerah di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2025 berada dalam kondisi yang relatif kondusif dan terkendali, ditandai dengan menurunnya potensi maupun kejadian konflik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Tingginya capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui pendekatan pencegahan dini, deteksi dini, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik di masyarakat, fasilitasi forum dialog antar kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam memberikan informasi awal terkait potensi gangguan stabilitas daerah. Selain itu, koordinasi dan sinergi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat keamanan, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Dari sisi analisis capaian, realisasi sebesar 72,72% menunjukkan bahwa sebagian besar potensi konflik yang teridentifikasi dapat dicegah atau dikelola secara efektif melalui langkah-langkah mediasi, komunikasi, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme deteksi dini dan penanganan konflik yang diterapkan telah berjalan cukup efektif dalam meredam potensi konflik sebelum berkembang menjadi konflik terbuka di masyarakat.

Dengan demikian, capaian kinerja pada sasaran ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam menurunkan potensi konflik, tetapi juga menunjukkan meningkatnya efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah. Kondisi ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya melalui penguatan sistem kewaspadaan dini, peningkatan kapasitas kelembagaan,

serta penguatan peran masyarakat dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan kondusif di Kabupaten Luwu Timur

Formula mengukur capaian kinerja Indikator “**Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD**” yaitu :

$$\text{Persentase Penurunan Konflik (\%)} = \frac{K_0 - K_t}{K_0} \times 100\%$$

Keterangan :

- K_0 = Jumlah konflik pada tahun dasar
- K_t = Jumlah konflik pada tahun berjalan

Persentase Penurunan Konflik = (11 Konflik – 3 Konflik) / 11 Konflik x 100%
= 8 Konflik / 11 Konflik x 100%
Realisasi = 72,72%

Tabel 3.12

Data Konflik Tahun 2025

No	Konflik	Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian	Tindak Lanjut/Solusi
1	Permasalahan Tana Malea	Loeha	Towuti	Permasalahan terkait Tana Malea Kecamatan Towuti	Sampai saat ini permasalahan belum terselesaikan
2	Permasalahan PT.Sindoka	Kasintuwu	Mangkutana	Permasalahan terkait PT.Sindoka di Desa Kasintuwu	Sampai saat ini permasalahan belum terselesaikan
3	Permasalahan terkait PTPN Mantadulu	Mantadulu	Angkona	Permasalahan terkait PTPN Mantadulu Kecamatan Angkona	Sampai saat ini permasalahan belum terselesaikan

Sumber Data : Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol, Tahun 2025

Pada periode yang dianalisis, jumlah konflik menurun dari 11 kasus menjadi 3 kasus. Ketiga konflik yang terjadi adalah permasalahan terkait Tana Malea di Kecamatan Towuti, permasalahan terkait PT. Sindoka di Desa Kasintuwu, dan permasalahan terkait PTPN Mantadulu di Kecamatan Angkona.

meskipun indikator penurunan konflik bersifat dinamis dan fluktuatif serta dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal di luar kendali langsung perangkat daerah. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan

pemantauan kondisi sosial politik, penguatan deteksi dini konflik, fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik, serta koordinasi yang intensif dengan Forkopimda, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan terkait. Melalui langkah-langkah antisipatif dan responsif yang dilakukan secara berkelanjutan, stabilitas dan kondusivitas wilayah dapat terjaga dengan baik.

3.4.1.2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN – TAHUN SEBELUMNYA

Selanjutnya, target dan realisasi kinerja sasaran strategis **meningkatkan stabilitas dan kondusifitas daerah** dengan indikator **Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD** tahun 2025 dengan beberapa tahun lalu dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 3.13

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah	Persentase penurunan konflik IPOLEKSOSBUD	2023	0	0	0
		2024	0	0	0
		2025	18,18%	72,72%	400%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya pada sasaran Meningkatkan Stabilitas dan Kondusivitas Daerah melalui indikator Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dan 2024 indikator tersebut belum dijadikan sebagai sasaran strategis, sehingga target dan realisasi kinerja belum ditetapkan. Indikator ini mulai ditetapkan sebagai sasaran strategis pada Renstra Tahun 2025-2029 dengan target penurunan konflik pada tahun 2025 sebesar 18,18%, yang ditetapkan berdasarkan kondisi tahun dasar serta dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Kabupaten Luwu Timur. Realisasi yang dicapai sebesar 72,72%, sehingga capaian kinerja mencapai 400%, yang menunjukkan bahwa tingkat konflik yang terjadi dapat ditekan secara signifikan dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur

dalam menjaga stabilitas daerah melalui penguatan deteksi dini konflik, pemantauan kondisi sosial politik, fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik, serta koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah, Forkopimda, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan terkait. Upaya pembinaan organisasi kemasyarakatan, fasilitasi dialog dan mediasi masyarakat, serta penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pimpinan daerah turut berkontribusi dalam menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif.

3.4.1.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.14

Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah

SASARAN : "MENINGKATNYA STABILITAS DAN KONDUSIVITAS DAERAH"				% CAPAIAN S/D 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2029
INDIKATOR KINERJA "PERSENTASE PENURUNAN KONFLIK IPOLEKSOSBUD	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RENSTRA 2029	
	18,18%	72,72	63,64	114,26%

Sasaran strategis Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah diukur melalui indikator Persentase penurunan konflik ipoleksosbud. Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 18,18%, dengan realisasi capaian sebesar 72,72%. Adapun target akhir Renstra Tahun 2029 ditetapkan sebesar 63,64%. Dengan demikian, capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 telah mencapai 114,26% terhadap target akhir Renstra.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja dalam upaya penurunan konflik sosial di Kabupaten Luwu Timur telah melampaui target jangka menengah yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga stabilitas daerah berjalan efektif, antara lain melalui pemantauan kondisi sosial politik masyarakat, penguatan deteksi dini potensi konflik, fasilitasi penyelesaian permasalahan melalui dialog dan mediasi, serta peningkatan koordinasi dengan unsur Forkopimda, aparat keamanan, pemerintah kecamatan, dan pemangku kepentingan terkait.

Meskipun capaian terhadap target jangka menengah telah melampaui

target yang ditetapkan, indikator penurunan konflik memiliki karakteristik yang dinamis dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat serta faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, upaya pemeliharaan stabilitas dan kondusivitas daerah tetap perlu dilakukan secara konsisten melalui penguatan sistem kewaspadaan dini, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kerukunan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Luwu Timur hingga akhir periode Renstra Tahun 2029.

3.4.1.4. PERBANDINGAN DENGAN TARGET NASIONAL

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional atau realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Tabel 3.15

Perbandingan dengan Target Nasional/Daerah Lain

SASARAN : MENINGKATNYA STABILITAS DAN KONDUSIVITAS DAERAH			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISIASI	REALISASI NASIONAL
"Persentase	TAHUN 2025 (%)	TAHUN 2025 (%)	ATAU DAERAH LAIN
Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	18,18	72,72	TIDAK ADA

Perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD dengan target nasional maupun capaian daerah lain belum dapat dilakukan secara langsung karena belum tersedianya indikator yang terstandar dan seragam pada tingkat kabupaten/kota, serta adanya perbedaan metodologi penghitungan dan karakteristik konflik di masing-masing daerah. Namun demikian, realisasi Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025 sebesar 72,72% menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan, serta secara substantif sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam penguatan stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban sosial sebagai prasyarat pembangunan daerah.

3.4.1.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Beberapa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indicator Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD jika mengacu pada pencapaian tahun 2025 yaitu :

- a. Terjalannya koordinasi dan sinergi yang baik dengan unsur Forkopimda, aparat keamanan, pemerintah kecamatan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga stabilitas daerah.
- b. Optimalnya pemantauan kondisi sosial politik masyarakat serta pemetaan potensi konflik di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
- c. Berfungsinya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam memberikan informasi awal terkait potensi konflik di masyarakat.
- d. Dilaksanakannya fasilitasi dialog dan mediasi terhadap permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik sehingga dapat diselesaikan secara persuasif.
- e. Meningkatnya peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

- a. Potensi konflik sosial yang bersifat dinamis, terutama yang berkaitan dengan permasalahan lahan, kepentingan kelompok, dan aktivitas perusahaan
- b. Keterbatasan informasi awal terkait potensi konflik yang berkembang di masyarakat pada beberapa wilayah.
- c. Cakupan wilayah yang luas sehingga pemantauan secara langsung belum dapat dilakukan secara optimal di seluruh wilayah secara bersamaan.
- d. Sebagian permasalahan konflik melibatkan banyak pihak sehingga membutuhkan proses koordinasi dan penyelesaian yang relatif lebih panjang.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

- a. Penguatan deteksi dini dan pemantauan potensi konflik.
- b. Peningkatan koordinasi lintas sektor dengan Forkopimda dan perangkat daerah terkait.
- c. Fasilitasi dialog dan mediasi dalam pencegahan konflik sosial.
- d. Pembinaan organisasi kemasyarakatan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- e. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan kepada

pimpinan daerah..

3.4.1.6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik sumber daya sarana, prasarana maupun tenaga dalam menunjang pencapaian kinerja terhadap sasaran “Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah” maka dapat difasilitasi dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan forum-forum strategis yang telah terbentuk, memaksimalkan fungsi Tim Informan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Melakukan koordinasi lintas sectoral dan memasang papan himbauan untuk tetap menjaga kerukunan dan kedamaian dimasyarakat.

Tabel 3.16

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Stabilitas dan kondusivitas daerah		Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	18,18%	72,72%	400%	3.075.129.400	2.928.809.281	95,24%
	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100%	100%	100%	1.642.396.800	1.561.725.081	95.09%
	2. Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Persentase konflik dan kejadian yang terselesaikan (%)	100%	100%	100%	1.432.799.600	1.367.084.200	95.41%

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.17

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat efisiensi Anggaran
Meningkatnya Stabilitas dan Kondusivitas Daerah	Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	400%	95,24	4.76%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisensi anggaran terhadap pencapaian kinerja indicator “Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD” adalah 4,76%

3.4.1.7 ANALISIS PROGAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Tercapainya target kinerja sasaran Meningkatnya stabilitas dan kondusifitas daerah dengan indicator kinerja “Persentase penurunan konflik IPOLEKSOSBUD ini tidak bisa lepas dari tercapainya program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagai pendukung sasaran. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan menjadi tatanan yang mendasari kebudayaan masyarakat serta mencerminkan kepribadian masyarakat itu sendiri.

Tujuan *Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan* adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan semangat kecintaan terhadap tanah air.

Sasaran program adalah Meningkatnya nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Indicator program yaitu Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Target kinerja 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Formula indikatornya adalah sebagai berikut :

Persentase Penguatan Ideologi Pancasila (%) = $\frac{\text{Jumlah Peserta yang Meningkatkan Pemahamannya}}{\text{Jumlah Peserta yang Disasar}} \times 100\%$

$$= 100 \text{ Orang} / 100 \text{ Orang} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Persentase Penguatan Ideologi Pancasila diukur dengan membandingkan jumlah peserta yang mengalami peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila dengan jumlah peserta yang disasar. Pada tahun 2025, kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi peningkatan kesadaran bela negara yang diikuti 30 orang serta kegiatan pembentukan Paskibraka yang diikuti 70 orang, sehingga total peserta yang disasar sebanyak 100 orang.

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, seluruh peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan semangat bela negara. Dengan demikian, capaian Persentase Penguatan Ideologi Pancasila mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - b. Sub kegiatan Pembentukan Paskibraka

b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Indikator kegiatan yaitu Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social. Pada tahun 2025 terealisasi 95,16% dari target 87%, dengan capaian 109%

Adapun formulasi kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Persentase konflik dan kejadian yang terselesaikan (\%)} = \frac{\text{Jumlah Konflik dan Kejadian yang Terselesaikan}}{\text{Jumlah Konflik dan Kejadian yang Terdata}} \times 100\%$$

$$= \frac{59 \text{ Kasus yang terselesaikan}}{62 \text{ kasus yang terdata}} \times 100\%$$

$$= 95,16\% \text{ atau capaian kinerja } 109\%$$

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Didaerah
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Didaerah
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi FORKOPIMDA

3.4.1.8. KESIMPULAN

- ❖ Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya stabilitas dan kondusifitas daerah” dengan indicator kinerja “Persentase penurunan konflik IPOLEKSOSBUD yaitu 400% diperoleh dengan rumus perhitungan “

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{72,72\%}{18,18\%} \times 100\%$$

$$= 400\%$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : Rp. 3.652.431.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.478.607.731 atau 95,24%.

Gambar 3.2.

Dokumentasi kegiatan “Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Program peningkatan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial



Dokumentasi Kegiatan Paskibraka Tahun 2025



Dokumentasi : Kegiatan Pemantauan Aksi Demonstrasi



Dokumentasi Kegiatan “Rapat Koordinasi FORKOPIMDA”

3.4.2. SASARAN - 2

“MENINGKATNYA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PILKADA”

Sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada dengan indikator sasaran yaitu tingkat partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara atau daerah, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan PEMILU dan PILKADA sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

❖ Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.4.2.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3.18

Capaian Indikator Sasaran II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase capaian
Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Dan Pilkada	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA	80,35%	80,35%	100%

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol

Berdasarkan tabel tersebut, Sasaran Strategis Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada diukur melalui indikator Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada. Pada tahun 2025 ditetapkan target partisipasi pemilih sebesar 80,35%, yang mengacu pada capaian rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Hingga akhir tahun 2025, realisasi indikator tersebut juga tercatat sebesar 80,35%,

sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa indikator ini bersifat periodik, karena pengukurannya sangat bergantung pada pelaksanaan Pemilu atau Pilkada. Pada tahun 2025 tidak terdapat penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada yang dapat dijadikan dasar pengukuran realisasi pada tahun berjalan. Oleh karena itu, nilai realisasi kinerja pada tahun 2025 masih mengacu pada capaian partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, sampai dengan tersedianya data resmi pada pelaksanaan Pemilu atau Pilkada berikutnya.

Dengan demikian, capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025 menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah selaras dengan capaian partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu sebelumnya. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi di daerah relatif baik. Meskipun demikian, upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan pendidikan politik, sosialisasi kepemiluan, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, guna menjaga bahkan meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di periode selanjutnya.

Formula mengukur capaian kinerja Indikator “Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada yaitu :

$$TPPM (\%) = \frac{TPP \text{ Pemilu} + TPP \text{ Pilkada}}{2}$$

Keterangan :

TPPM = Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat
 TPP Pemilu = Tingkat partisipasi PEMILU
 TPP Pilkada = Tingkat partisipasi PILKADA

$$TPPM = (82,39\% + 78,30\%) / 2$$

$$\text{Realisasi} = 80,35\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Data partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19

**Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak
(PILEG dan PILPRES) Tahun 2024**

NO	KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL (SUARA SAH + SUARA TIDAK SAH)	PERSENTASE (%)
1	Burau	25.316	20.478	240	20.718	81.84
2	Wotu	24.116	19.953	333	20.286	84.12
3	Tomoni	19.318	15.941	306	16.247	84.10
4	Tom-Tim	10.217	8.404	92	8.496	83.16
5	Mangkutana	16.392	12.930	164	13.094	79.88
6	Kalaena	9.125	7.385	78	7.463	81.79
7	Angkona	18.244	14.919	311	15.230	83.48
8	Malili	30.587	24.910	366	25.276	82.64
9	Wasuponda	15.793	12.453	102	12.555	79.50
10	Towuti	31.968	26.879	313	27.192	85.06
11	Nuha	17.246	13.237	89	13.326	77.27
Total		218.322	177.489	2.394	179.883	82,39

Sumber : Bid. Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol dan KPU Kab. Luwu Timur

Tabel 3.20

**Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak
(Pilkada Tahun 2024)**

NO	KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL (SUARA SAH + SUARA TIDAK SAH)	PERSENTASE (%)
1	Burau	25.398	19.881	308	20.189	79,49
2	Wotu	24.373	19.643	268	19.911	81,69
3	Tomoni	19.686	15.778	213	15.991	81,23
4	Tom-Tim	10.277	8.154	144	8.298	80,74
5	Mangkutana	16.537	12.456	169	12.625	76,34
6	Kalaena	9.067	7.221	117	7.338	80,93
7	Angkona	18.365	14.647	281	14.928	81,29
8	Malili	31.499	25.036	225	25.261	80,20
9	Wasuponda	15.853	11.904	142	12.046	75,99
10	Towuti	33.549	25.460	270	25.730	76,69
11	Nuha	17.416	11.452	173	11.625	66,75
Total		222.020	171.632	2310	173.942	78,30

Sumber : Bid. Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol dan KPU Kab. Luwu Timur

3.4.2.2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN – TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3. 21

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	Tingkat partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA	2023	79,18	79,18	100%
		2024	80,05	80,35	100,37%
		2025	80,35	80,35	100%

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa, sasaran Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada dengan Indikator Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada menunjukkan perkembangan kinerja yang positif dan konsisten dalam mendukung peningkatan partisipasi politik masyarakat. Pada Tahun 2023, tingkat partisipasi pemilih tercatat sebesar 79,18% dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menjadi dasar (baseline) dalam perencanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi di daerah.

Pada Tahun 2024, pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif serta Pilkada Serentak menjadi momentum penting dalam pengukuran indikator ini. Realisasi tingkat partisipasi pemilih mencapai 80,35%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 80,05%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,37%. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas upaya pembinaan politik, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan mengacu pada hasil pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, yaitu sebesar 80,35 persen. Dengan realisasi yang juga mengacu pada capaian tersebut, kinerja Tahun 2025 mencapai 100% dan menunjukkan terjaganya konsistensi partisipasi politik masyarakat meskipun tidak terdapat pelaksanaan Pemilu atau Pilkada pada tahun berjalan.

3.4.2.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.22

Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah

SASARAN II : MENINGKATNYA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PILKADA				% CAPAIAN S/D 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2029
INDIKATOR KINERJA "TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU DAN PILKADA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISIASI TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR RENSTRA 2029 (%)	
	80,35	80,35	81,50	98,58

Berdasarkan tabel tersebut, Sasaran II yaitu Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada diukur melalui indikator Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 80,35%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 80,35%, sehingga capaian kinerja pada tahun tersebut mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 81,50%, maka capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 98,58% dari target akhir yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada telah mendekati target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Renstra, sehingga secara umum kinerja pada sasaran ini dapat dikategorikan sangat baik dan berada pada jalur pencapaian target akhir Renstra.

Namun demikian, indikator ini bersifat periodik, karena pengukurannya bergantung pada pelaksanaan Pemilu atau Pilkada. Pada tahun 2025 tidak terdapat pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada yang dapat menjadi dasar pengukuran baru, sehingga nilai realisasi tahun 2025 masih mengacu pada capaian tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 hingga tersedianya data resmi pada pelaksanaan pemilu berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilih sudah cukup tinggi, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran politik masyarakat serta efektivitas upaya pendidikan politik dan sosialisasi kepemiluan yang telah dilaksanakan. Ke depan, upaya peningkatan partisipasi pemilih tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan agar target akhir Renstra tahun 2029 dapat tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

3.4.2.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDAR NASIONAL

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional atau realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Tabel 3.23

Perbandingan dengan Target Nasional/Daerah Lain

SASARAN II : MENINGKATNYA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PILKADA			
INDIKATOR KINERJA: "TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU DAN PILKADA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISIASI TAHUN 2025 (%)	REALISASI DAERAH LAIN
	80,35%	80,35%	79,79%

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2025 sebesar 80,35 %, telah memenuhi target yang ditetapkan. Nilai tersebut bersumber dari hasil Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, mengingat indikator ini bersifat periodik dan tidak ditargetkan per triwulan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Luwu Utara yang tercatat sebesar 80,00%, capaian Kabupaten Luwu Timur berada pada tingkat yang lebih tinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Luwu Timur relatif lebih baik dibandingkan daerah pembanding, serta mengindikasikan efektivitas upaya pembinaan, sosialisasi, dan fasilitasi pendidikan politik masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait

3.4.2.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Beberapa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indicator tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada yaitu :

- Menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait maupun partai politik dalam melaksanakan Pendidikan politik dimasyarakat;
- Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki;
- Memaksimalkan jumlah personil yang ada dalam pembagian wilayah pemantauan dan pelaksanaan kegiatan

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Pendidikan politik;
- Minimnya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Ormas, LSM dan OKP serta kegiatan Pendidikan politik kepada masyarakat;
- Terbatasnya sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan tugas pemantauan situasi politik dimasyarakat

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

- Meningkatkan jalinan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya;
- Melakukan sosialisasi yang masif, terkait Pendidikan politik dimasyarakat;
- Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan

3.4.2.6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik sumber daya sarana, prasarana maupun tenaga dalam menunjang pencapaian kinerja terhadap sasaran “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum” maka dapat difasilitasi dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan dengan instansi terkait dan partai-partai politik untuk melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik dimasyarakat.

Tabel 3.24
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Program/	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat dalam PEMILU dan PILKADA		Tingkat Partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA	80,35%	80,35%	100%	1,238,202,265	1,230,452,775	99,37%

Sasaran Strategis	Program/	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik melalui hibah daerah (%)	100%	100%	100%	1,238,202,265	1,230,452,775	99,37%
		Persentase peningkatan pemahaman pendidikan politik dan pengembangan etika budaya politik kepada masyarakat (%)	100%	100%	100%			

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.25
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat efisiensi anggaran
Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat dalam PEMILU dan PILKADA	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA	100	99,37	0,63

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisensi anggaran terhadap pencapaian kinerja indicator “*Tingkat Partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA* ” adalah 0,63%

3.4.2.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Tercapainya target kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat dalam PEMILU dan PILKADA dengan indikator kinerja Tingkat Partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA tidak bisa lepas dari tercapainya program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagai pendukung sasaran. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Sasaran kinerja program yaitu Meningkatnya etika dan budaya politik. Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase partai politik yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik melalui hibah dana, dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%. Adapun formula untuk mengukur capaian kinerja indikator ini adalah

$$\begin{aligned} \text{Persentase Partai Politik yang Melaksanakan Pendidikan Politik (\%)} &= \text{Jumlah Partai Politik yang Melaksanakan Pendidikan Politik} \div \text{Jumlah Partai Politik yang Menerima Hibah Daerah} \times 100\% \\ &= 11 \text{ Partai Politik yang melaksanakan Pendidikan Politik} / 11 \text{ Partai Politik Penerima Hibah Daerah} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2. Persentase peningkatan pemahaman pendidikan politik dan pengembangan serta etika budaya politik kepada masyarakat. target kinerja 100% dan terealisasi 100%. Adapun formula untuk mengukur capaian kinerja indikator ini adalah

$$\begin{aligned} \text{Persentase Peningkatan Pemahaman (\%)} &= \text{Jumlah Peserta yang Meningkatkan Pemahamannya} \div \text{Jumlah Peserta yang Disasar} \times 100\% \\ &= 150 \text{ Orang} / 150 \text{ Orang} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program yaitu terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik,

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- a. Sub Kegiatan : Penyusunan program kerja dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik
- b. Sub Kegiatan : Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik
- c. Sub Kegiatan : Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik

3.4.2.8. KESIMPULAN

- ❖ Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat dalam PEMILU dan PILKADA” dengan indicator kinerja “Tingkat Partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA yaitu 100% diperoleh dengan rumus perhitungan “

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{80,35\%}{80,35\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : Rp. 1,238,202,265 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1,230,452,775 atau 99,37%.

Gambar 3.3.

Dokumentasi Kegiatan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik



Dokumentasi Kegiatan "Rapat Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik"



Dokumentasi Kegiatan " Rapat Evaluasi dan Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik"



Dokumentasi Kegiatan "Sosialisasi Pendidikan Politik"

3.4.3. SASARAN - 3

“MENINGKATNYA PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DSLAM PEMBANGUNAN DAERAH”

Sasaran Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja persentase peran ormas dalam pembangunan daerah. Indikator ini digunakan untuk menilai kontribusi ormas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.

Capaian indikator menunjukkan efektivitas pembinaan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan. Hasil capaian ini mencerminkan tingkat partisipasi ormas dalam pembangunan daerah serta menjadi acuan penting untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan daerah.

❖ Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.4.3.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3.26

Capaian Indikator Sasaran III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dslam Pembangunan Daerah	persentase peran ormas dalam pembangunan daerah	52%	54,48%	104,77

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol

Dari tabel di atas dapat dapat dijelaskana bahwa Indikator kinerja persentase peran organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pembangunan daerah pada Tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 54,48%, melebihi target Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 52%, sehingga persentase capaian mencapai 104,77%.

Data tersebut didukung oleh jumlah ormas terdaftar sebanyak 290, dengan 158 ormas aktif yang secara nyata berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan daerah. Capaian ini mencerminkan efektivitas pembinaan dan fasilitasi pemerintah daerah terhadap ormas, serta menunjukkan bahwa keterlibatan

ormas dalam mendukung pembangunan daerah lebih tinggi dari yang direncanakan, sekaligus menjadi indikator keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan

Formula mengukur capaian kinerja yaitu :

$$\text{Persentase Ormas (\%)} = \frac{\text{ORMAS}_{\text{AKTIF}}}{\text{ORMAS}_{\text{TERDAFTAR}}} \times 100\%$$

Keterangan :

- $\text{ORMAS}_{\text{AKTIF}}$ = Jumlah keseluruhan ormas yang aktif dalam pembangunan
- $\text{ORMAS}_{\text{TERDAFTAR}}$ = Jumlah seluruh organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan memiliki SKT/terverifikasi pada pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol.

Persentase Ormas (%) = 158 Ormas Aktif / 290 Ormas Terdaftar x 100%

Realisasi = 54,48%

Capaian Kinerja = 104,77%

3.4.3.2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN – TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3. 27

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah	Persentase Peran Ormas Dalam Pembangunan Daerah	2023	Belum ditargetkan	0%	0%
		2024	Belum ditargetkan	0%	0%
		2025	52%	54,48%	104,77%

Dari table diatas dapat dijelaskan Indikator persentase peran Ormas dalam pembangunan daerah merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan pada tahun 2025. Pada tahun 2023 dan 2024, indikator ini belum ditargetkan sehingga realisasinya tercatat 0%, menandakan bahwa pengukuran formal

terhadap peran Ormas belum dilakukan sebelumnya.

Pada tahun 2025, target ditetapkan sebesar 52% dan realisasi mencapai 54,48%, sehingga capaian melebihi target sebesar 104,77%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun indikator baru, partisipasi Ormas dalam pembangunan daerah sudah cukup signifikan, dan pelaksanaan program pembinaan serta pemberdayaan Ormas telah berhasil mendorong keterlibatan aktif mereka. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian 2025 menjadi titik awal yang positif untuk mengukur dan meningkatkan peran Ormas di masa mendatang.

3.4.3.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.28

Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah

SASARAN III : MENINGKATNYA PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH				% CAPAIAN S/D 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2029
INDIKATOR KINERJA "PERSENTASE PERAN ORMAS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH"	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR RENSTRA 2029 (%)	
	52%	54,48%	61%	89,31%

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi kinerja indikator "Persentase Peran Ormas dalam Pembangunan Daerah" pada tahun 2025 mencapai 54,48%, melebihi target tahunan yang ditetapkan sebesar 52%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pemberdayaan Ormas dalam pembangunan daerah telah berjalan efektif dan menghasilkan partisipasi yang lebih tinggi dari yang direncanakan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029, yakni 61%, capaian hingga tahun 2025 sebesar 54,48% telah mencapai 89,31% dari target akhir. Artinya, dalam waktu satu tahun, indikator baru ini telah berhasil mendekati capaian jangka menengah, menunjukkan progres positif yang solid dan menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan peran Ormas pada tahun-tahun berikutnya.

3.4.3.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDAR NASIONAL

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah

capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional atau realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Tabel 3.29

Perbandingan dengan Target Nasional/Daerah Lain

SASARAN III : MENINGKATNYA PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH			
INDIKATOR KINERJA: "PERSENTASE PERAN ORMAS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISIASI TAHUN 2025 (%)	REALISASI DAERAH LAIN
	52%	54,48	Tidak Ada

Indikator "Persentase Peran Ormas dalam Pembangunan Daerah" di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 54,48%, sedikit melebihi target tahunan 52%. Hingga saat ini, belum terdapat data nasional atau perbandingan resmi dari daerah lain terkait indikator serupa, sehingga capaian Luwu Timur belum bisa dibandingkan secara kuantitatif dengan daerah lain atau target nasional.

Meski demikian, pencapaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur telah berhasil mendorong partisipasi Ormas secara signifikan, dan capaian 54,48% ini dapat dijadikan baseline awal untuk pengukuran partisipasi Ormas di masa mendatang. Kondisi ini juga menegaskan bahwa program pembinaan dan pemberdayaan Ormas di Luwu Timur telah berjalan efektif meskipun indikator ini masih baru dan belum ada standar pembandingan dari daerah lain.

3.4.3.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Beberapa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator Persentase Peran Ormas Dalam Pembangunan Daerah yaitu :

- Pembinaan dan koordinasi rutin oleh Kesbangpol.
- Program pemberdayaan Ormas yang terstruktur.
- Peningkatan kesadaran Ormas dan masyarakat.
- Dukungan administratif dari pemerintah daerah.
- Monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan keterlibatan Ormas.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

- Keterbatasan kapasitas Ormas – SDM dan sumber daya yang terbatas.

- b. Koordinasi yang belum merata – Beberapa Ormas kurang terintegrasi dalam program pembangunan.
- c. Kesadaran partisipasi berbeda – Tidak semua Ormas termotivasi untuk aktif.
- d. Kendala administratif – Proses pendaftaran atau perizinan masih menjadi hambatan.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

- a. Sosialisasi – Meningkatkan kesadaran Ormas melalui sosialisasi dan rapat koordinasi
- b. Fasilitasi Administratif – Mempermudah proses pendaftaran, dan akses informasi bagi Ormas.
- c. Monitoring dan Evaluasi – Melakukan pemantauan berkala untuk menyesuaikan strategi dan memastikan partisipasi Ormas efektif

3.4.3.6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik sumber daya sarana, prasarana maupun tenaga dalam menunjang pencapaian kinerja terhadap sasaran “Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Daerah” maka dapat difasilitasi dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan dengan instansi terkait dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kontribusi dan perannya dalam pembangunan daerah.

Tabel 3.30

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Program/	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Peran Ormas Dalam Pembangunan Daerah	52%	54,48%	104,77 %	77,664,400	66,888,500	86.13

Sasaran Strategis	Program/	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Dalam Pembangunan Daerah	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas/Rumah ibadah/kelompok terdaftar setiap tahun (%)	100%	100%	100%	77,664,400	66,888,500	86.13

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.31
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat efisiensi anggaran
Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Daerah	Persentase Peran Ormas Dalam Pembangunan Daerah	104,77%	86,13%	13,87

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran terhadap pencapaian kinerja indicator “Persentase Peran Ormas Dalam Pembangunan Daerah ” adalah 13,87%

3.4.3.7. ANALISIS PROGAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Tercapainya target kinerja sasaran Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Daerah dengan indicator kinerja Persentase Peran Ormas Dalam Pembangunan Daerah tidak bisa lepas dari tercapainya program,kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagai pendukung sasaran. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai be

1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sasaran program yaitu Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan. Dengan indicator Persentase Ormas/Rumah Ibadah/kelompok terdaftar setiap tahun. Pada Tahun 2025 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% atau capaian kinerja 100% Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok yang Terdaftar

Formulasi untuk mengukur capaian kinerja program ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok (\%)} &= \text{Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok yang Terdaftar} \div \text{Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok yang terdata} \times 100\% \\ &= 155 \text{ Kelompok terdaftar} / 155 \text{ Kelompok terdata} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Persentase Ormas, rumah ibadah, dan kelompok masyarakat yang terdaftar di Kabupaten Luwu Timur mencapai 100%, karena seluruh 155 kelompok yang terdata telah resmi terdaftar. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pendataan dan registrasi kelompok masyarakat telah dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, sehingga tidak ada kelompok yang terlewat. Kondisi ini sangat penting karena pendaftaran resmi menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, koordinasi, dan pemberdayaan Ormas maupun kelompok lainnya secara lebih efektif. Selain itu, data yang lengkap memudahkan pemerintah dalam perencanaan program pembangunan, penyaluran bantuan, serta pengawasan kegiatan, sehingga keterlibatan Ormas dan kelompok masyarakat dalam pembangunan daerah dapat lebih optimal. Pencapaian 100% ini juga menjadi indikator bahwa keterlibatan seluruh kelompok masyarakat di Luwu Timur dalam sistem administrasi resmi telah terjamin, sebagai langkah awal yang kuat untuk meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 3.32
Jumlah ormas/LSM/Kelompok Tani/Rumah Ibadah yang Terdata dan Terdaftar
Tahun 2021 - 2025

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Ormas / LSM	20	19	4	17	29
2.	Rumah Ibadah (Mesjid)	30	23	32	45	34
3.	Rumah Ibadah (Gereja)	17	9	26	37	34
4.	Rumah Ibadah (Pura)	10	3	13	11	9
5.	Lembaga Pendidikan /Sekolah	0	0	167	8	0
6.	Kelompok Tani dan Nelayan	77	96	131	39	37
7.	Kelompok Seni	0	0	6	7	12
Jumlah		154	150	379	164	155

Sumber Data : Bidang Poldagri Kesbangpol Luwu Timur (2025)

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Sub Kegiatan : Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah

3.4.3.8. KESIMPULAN

- ❖ Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Daerah” dengan indicator kinerja “Persentase Peran Ormas Dalam Pembangunan Daerah yaitu 100% diperoleh dengan rumus perhitungan “

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{54,48\%}{52\%} \times 100\% \\
 &= 104,77\%
 \end{aligned}$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : Rp. 77,664,400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 66,888,500 atau 86,13%.

Gambar 3.4

Dokumentasi Kegiatan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan



3.4.4. SASARAN 4

" MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH "

➤ Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi di setiap organisasi pemerintah dan termasuk dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan utama dari peningkatan akuntabilitas kinerja

perangkat daerah, khususnya pelayanan SKPD, adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, ditetapkan indikator kinerja berupa Nilai SAKIP, yang mencerminkan tingkat akuntabilitas, kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja SKPD. Dengan demikian, pencapaian sasaran ini tidak hanya menunjukkan kinerja organisasi yang terukur, tetapi juga menjadi dasar bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

3.4.4.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3.33

Capaian Indikator Sasaran IV

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	70,00	80,00	114,28%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Capaian indikator Nilai SAKIP untuk Sasaran Strategis IV pada Tahun 2025 tercatat 80,00, melebihi target tahunan sebesar 70, sehingga persentase capaian mencapai 114,28%. Perlu dicatat bahwa data realisasi ini masih menggunakan data tahun 2024, sehingga angka tersebut mencerminkan kondisi terakhir yang terdokumentasi hingga akhir 2024.

Meskipun demikian, pencapaian di atas target menunjukkan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja SKPD. Hasil ini menjadi indikator positif bahwa SKPD telah menjalankan tata kelola pemerintahan dengan lebih efektif dan efisien, sekaligus menjadi dasar bagi upaya peningkatan Nilai SAKIP yang lebih akurat ketika data tahun 2025 resmi tersedia.

3.4.4.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Selanjutnya, perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2025 dengan beberapa tahun yang lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	KATEGORI	CAPAIAN KINERJA
Nilai Sakip	Nilai	2023	69	77,95	BB	112,97%
		2024	77,95	80,00	BB	102,62%
		2025	70	80,00	BB	114,28%

Berdasarkan tabel capaian kinerja Nilai SAKIP, dapat dijelaskan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan capaian yang baik dan konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, target nilai SAKIP sebesar 69 dengan realisasi sebesar 77,95 sehingga capaian kinerja mencapai 112,97% dan berada pada kategori BB. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang direncanakan.

Pada tahun 2024, target kinerja meningkat menjadi 77,95 dan realisasi yang dicapai sebesar 80,00 dengan kategori BB, sehingga capaian kinerja sebesar 102,62%. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja organisasi meskipun target yang ditetapkan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Selanjutnya pada tahun 2025, target nilai SAKIP ditetapkan sebesar 70 dengan realisasi sebesar 80,00 sehingga capaian kinerja mencapai 114,28% dan tetap berada pada kategori BB. Namun demikian, realisasi nilai tersebut masih mengacu pada hasil evaluasi SAKIP tahun 2024, karena hasil penilaian SAKIP untuk tahun 2025 belum diterbitkan oleh instansi evaluator. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen kinerja organisasi telah berjalan secara konsisten dan mampu mempertahankan predikat BB dalam penilaian akuntabilitas kinerja.

3.4.4.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.35

Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah

SASARAN IV: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH				% CAPAIAN S/D 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2029
INDIKATOR KINERJA "NILAI SAKIP	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISIASI TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR RENSTRA 2029 (%)	
	70,00 (BB)	80,00 (BB)	72,00 (BB)	111,11%

Realisasi indikator Nilai SAKIP pada tahun 2025 tercatat 80,00, melebihi target tahunan 70, sehingga capaian tahun 2025 mencapai 114,28%. Data ini masih Menggunakan realisasi tahun 2024, karena evaluasi resmi untuk tahun 2025 oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sebagai tim evaluator belum dilakukan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2029 sebesar 72,00, capaian tahun 2025 telah mencapai 111,11%, menunjukkan bahwa SKPD sudah melampaui target jangka menengah lebih awal. Hal ini menandakan peningkatan akuntabilitas kinerja yang signifikan, efektifitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik, serta menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan atau meningkatkan Nilai SAKIP ketika evaluasi resmi tahun 2025 selesai dilakukan.

3.4.4.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Daerah Lain

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional atau realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Tabel 3.36

Perbandingan dengan Target Nasional/Daerah Lain

SASARAN IV : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH			
INDIKATOR KINERJA SASARAN : "NILAI SAKIP	TARGET TAHUN 2025	REALISIASI TAHUN 2025	REALISASI DAERAH LAIN
	70,00	80,00	73,06

Berdasarkan table di atas dapat dijelaskan bahwa Sasaran IV menekankan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang diukur melalui nilai SAKIP. Untuk tahun 2025, target ditetapkan sebesar 70, sedangkan realisasi masih menggunakan data tahun 2024, yaitu 80. Capaian ini sudah melebihi target awal sebesar 10 poin, menandakan kinerja perangkat daerah tetap baik meskipun evaluasi resmi tahun 2025 belum dilakukan oleh Inspektorat.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, misalnya Kesbangpol Kabupaten Purbalingga dengan realisasi SAKIP 73,06 dengan nilai 80 menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja perangkat daerah ini lebih tinggi 6,94 poin. Hal ini menegaskan bahwa kinerja Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur berada di atas rata-rata daerah lain dan konsisten mempertahankan kualitas manajemen kinerja yang baik, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi SAKIP dibandingkan OPD sejenis.

3.4.4.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Secara keseluruhan dari tahun ke tahun capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terhadap sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD menunjukan predikat baik, hal ini disebabkan beberapa factor :

1. Badan Kesbangpol telah memiliki Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah baik pada periode 2021-2024 maupun pada periode 2025 - 2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan target jangka menengah;
2. Telah disusun RKT, Perjanjian dan Rencana Aksi dan telah selaras dengan Renstra;
3. Pemberdayaan SDM / Aparatur yang cukup maksimal sehingga mendukung kelancaran operasional kantor.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

2. Evaluasi resmi kinerja tahun berjalan belum dilakukan, sehingga capaian masih menggunakan data tahun sebelumnya.
3. Pegawai yang terbatas atau kurang pengalaman dalam penyusunan laporan SAKIP dan manajemen kinerja.

4. Terkadang data program/kegiatan belum lengkap atau belum terintegrasi sehingga menyulitkan analisis kinerja secara tepat waktu
5. Pembatasan anggaran untuk kegiatan monitoring, evaluasi, atau peningkatan kapasitas SDM dapat mempengaruhi pencapaian kinerja
6. Adanya perubahan aturan di tingkat pusat/daerah yang memerlukan penyesuaian cepat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya:

1. Menyelaraskan semua dokumen perencanaan sampai tingkat bawah;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan atau triwulan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan rapat internal.
3. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
4. Mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan asistensi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.4.4.6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

- Pemanfaatan Anggaran Tepat Sasaran – Anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas sesuai Rencana Kerja Tahunan, sehingga capaian SAKIP melebihi target.
- Efisiensi Sarana dan Prasarana – Penggunaan sarana kerja, dokumen, dan teknologi informasi difokuskan untuk mendukung pengelolaan kinerja
- Optimalisasi SDM – Pegawai memanfaatkan waktu dan kapasitas kerja secara efektif, dengan penugasan berbasis kompetensi
- Pemanfaatan Data untuk Pengambilan Keputusan – Data dan dokumentasi digunakan untuk evaluasi dan penyesuaian strategi agar sumber daya diarahkan ke kegiatan yang memberikan hasil optima

Tabel 3.37
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah		Nilai Sakip	70	80,00	114,28%	3,789,876,609	3,610,971,297	95,28
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan Perangkat Daerah yang berjalan sesuai standar(%)	100%	98,43%	98,43%	3,789,876,609	3,610,971,297	95,28

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.38
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat efisiensi Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan Perangkat Daerah yang berjalan sesuai standar(%)	114,28%	95,28%	4,72%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisensi anggaran terhadap pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang merupakan adalah 4,72%

3.4.4.7. ANALISIS PROGAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 terdiri dari 1 (satu) program, 8 (delapan) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Sasaran program yaitu Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi. Indikator program adalah Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar.

Target yang ditetapkan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada triwulan 4 Tahun 2025 adalah yaitu 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. Formulasi mengukur capaian program :

$$\begin{aligned}\text{Persentase Penunjang Urusan (\%)} &= \frac{\text{Jumlah kegiatan penunjang sesuai standar}}{\text{Dibagi Total kegiatan penunjang}} \times 100\% \\ &= \frac{8 \text{ kegiatan}}{8 \text{ Kegiatan}} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, persentase kegiatan penunjang urusan mencapai 100%, karena seluruh kegiatan penunjang yang dilaksanakan (8 kegiatan) sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (8 kegiatan dari total 8 kegiatan).

Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah telah melaksanakan seluruh kegiatan penunjang secara lengkap dan sesuai ketentuan, mencerminkan kepatuhan terhadap standar prosedur, efektivitas pengelolaan program, dan optimalisasi peran kegiatan penunjang dalam mendukung pencapaian sasaran utama OPD. Dengan capaian 100%, dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan penunjang berjalan sesuai rencana dan memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian kinerja keseluruhan

Program ini didukung 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3..39

**Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Kabupaten/Kota**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	Tersusun dokumen perencanaan yaitu Renja Pokok 2026, Renja Perubahan 2025, LAKIP 2024, LKPJ 2024, Laporan Evaluasi Kinerja triwulan 1, 2 dan 3; Laporan Evaluasi Tahun 2024 RKPd Tw 1,2 dan 3 Tahun 2025
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	– Renja Pokok 2026; – Renja Perubahan 2025
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Dokumen RKA Pokok 2026 dan Dokumen RKA-Perubahan 2025
1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun	10 Laporan	10 Laporan	100%	– Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan sebanyak 4 laporan – Laporan Evaluasi RKPd Triwulan sebanyak 4 laporan – Lakip 2024 sebanyak 1 laporan – LKPJ 2024 sebanyak 1 laporan
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	100%	100%	Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran serta laporan keuangan tahunan
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Orang/bln	14 Orang/bln	100%	Terbayarkan gaji dan tunjangan kepada 14 Orang ASN setiap bulan
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD yang disusun	18 Laporan	18 Laporan	100%	– Laporan keuangan Bulanan sebanyak 12 laporan; – Laporan keuangan triwulan sebanyak 4 laporan; – Laporan keuangan semesteran sebanyak 1 laporan; – Laporan Keuangan tahunan sebanyak 1 laporan
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	100%	100%	Tersusun dokumen administrasi barang milik daerah
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan	4 Laporan	4 laporan	100%	Tersusun laporan penatausahaan barang

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
		barang milik daerah pada SKPD yang disusun				milik daerah setiap triwulan
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	Terelisasi sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sub kegiatan pendudukan kegiatan
4.1	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Tersusun dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada setiap triwulan
4.2	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	5 Orang	100%	- 1 orang mengikuti bimtek penyusunan renstra - 1 orang mengikuti bimtek penatausahaan keuangan - 1 orang mengikuti bimtek kepegawaian - 1 orang mengikuti bimtek kepala OPD - 1 orang mengikuti bimtek pelayanan publik
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	Terelisasi sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sub kegiatan pendudukan kegiatan
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100%	Terpenuhinya/tersedianya komponen instalasi listrik sesuai dengan kebutuhan (lampu, kabel, stop kontak, colokan, DII)
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	11 Paket	11 Paket	100%	diadakan 11 paket peralatan dan perlengkapan kantor (Pengadaan Laptop, Printer, Hardisk, Speaker Wireless, MC Wireless, Gorden Kantor, Dispenser, Karpet, Timbangan Badan, Pengukur Tinggi Badan, dan LCD)"
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	100%	Terpenuhinya/tersedianya bahan logistic kantor sesuai dengan kebutuhan (alat dan bahan kebersihan)
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	4 Paket	4 Paket	100%	Tersedianya barang cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
		disediakan				
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Dokumen	60 Dokumen	100%	Tersedia 60 dokumen bahan bacaan
5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan	4 laporan	100%	Tersusun laporan kunjungan tamu
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	Tersusun laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100%	87,50%	87,50%	Tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional yang tidak mencapai target akibat adanya keterlambatan penyedia menyelesaikan dokumen
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 Unit	1 Unit	33,33%	Kendaraan dinas/operasional yang diadakan yaitu : – 1 unit mobil double cabin – Sedangkan pengadaan 2 unit motor tidak direalisasikan dikarenakan keterlambatan penyedia menyelesaikan dokumen administrasi
6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 Paket	10 Paket	100%	diadakannya 10 paket mebel (Meja Komputer, Meja Pejabat, Meja Staf, Meja Rapat, Kursi Staf, Kursi Rapat, Kursi Tamu, filling cabinet, lemari arsip, lemari)
6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	3 unit	100%	Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan yaitu : – 2 unit AC Split – 1 unit tiang bendera
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	Terlisisasi sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sub kegiatan pendukung kegiatan
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa	4 laporan	4 laporan	100%	Tersusun laporan penyediaan jasa surat

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
		surat menyurat				menyurat
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	4 laporan	100%	Tersusun laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	4 laporan	100%	Tersusun laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	100%	100%	Terelisasi sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sub kegiatan pendukung kegiatan
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	4 Unit	100%	Kendaraan yang dipelihara yaitu : - 1 unit mobil - 3 unit motor
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	36 unit	36 unit	100%	Peralataan dan mesin yang dipelihara yaitu - 1 unit mesin babat - 10 unit AC - 3 unit PC - 7 unit laptop - 10 unit printer
8.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%	Terpeliharanya 2 unit Gedung kantor yaitu (kantor kesbangpol dan kantor FKUB Kab. Luwu Timur)
8.4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%	Terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung kantor yaitu taman/halaman kantor

3.4.4.8 KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran Strategis "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan" dengan indicator kinerja "Nilai SAKIP" yaitu 114,28% diperoleh dari rumus perhitungan

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{80,00}{70,00} \times 100\%$$

$$= 114,28\%$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Tahun 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : Rp. 3.789.826.609,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.610.971.297,- atau 95,28%.

3.5. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp. 8,758,174,674,- (Delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp. 8,386,920,303,- (Delapan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga rupiah) atau 95,76 %.

Table 3.40

Pagu Dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025

NO	BELANJA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Belanja Operasi	7.809.113.674	7.501.805.283	85,65
	Belanja Pegawai	2.067.704.566	1.999.487.640	96,70
	Belanja Barang dan Jasa	4.441.344.843	4.202.253.378	94,61
	Belanja Hibah	1.300.064.265	1.300.064.265	100
2	Belanja Modal	949.061.000	885.115.020	10,11
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	949.061.000	885.115.020	93,36
Total		8,758,174,674	8,386,920,303	95,76

Tabel 3.41

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	3,789,876,609	3,610,971,297	95.28	178,905,312	4.72
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67,975,803	61,281,024	90.15	6,694,779	9.85
1.	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	36,802,500	34,428,124	93.55	2,374,376	6.45
2.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	3,118,000	2,950,000	94.61	168,000	5.39
3.	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	2,637,500	2,534,500	96.09	103,000	3.91
4.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	25,417,803	21,368,400	84.07	4,049,403	15.93
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,116,351,066	2,041,937,340	96.48	74,413,726	3.52
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2,067,704,566	1,999,487,640	96.70	68,216,926	3.30
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD	48,646,500	42,449,700	87.26	6,196,800	12.74
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13,054,000	11,510,630	88.18	1,543,370	11.82
1.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	13,054,000	11,510,630	88.18	1,543,370	11.82
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67,783,000	56,238,937	82.97	11,544,063	17.03
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35,257,000	31,555,888	89.50	3,701,112	10.50
2.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	32,526,000	24,683,049	75.89	7,842,951	24.11
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	545,911,740	526,794,840	96.50	19,116,900	3.50
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	20,270,000	20,270,000	100.00	-	0.00
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188,000,000	185,607,700	98.73	2,392,300	1.27
3.	Penyediaan bahan logistik kantor	14,289,340	14,289,140	100.00	200	0.00
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13,390,000	13,037,260	97.37	352,740	2.63
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8,040,000	8,040,000	100.00	-	0.00
6.	Fasilitasi kunjungan tamu	16,500,000	14,460,000	87.64	2,040,000	12.36
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285,422,400	271,090,740	94.98	14,331,660	5.02
6.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	761,061,000	699,507,320	91.91	61,553,680	8.09
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	638,196,000	583,159,000	91.38	55,037,000	8.62
2	Pengadaan Mebel	103,865,000	97,471,320	93.84	6,393,680	6.16
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,000,000	18,877,000	99.35	123,000	0.65

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
7.	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	96,770,000	94,413,821	97.57	2,356,179	2.43
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	1,610,000	1,549,254	96.23	60,746	3.77
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33,600,000	32,954,567	98.08	645,433	1.92
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	61,560,000	59,910,000	97.32	1,650,000	2.68
8.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	120,970,000	119,287,385	98.61	1,682,615	1.39
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	24,000,000	23,523,585	98.0	476,415	1.99
2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	37,970,000	36,954,800	97.33	1,015,200	2.67
3.	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	46,000,000	45,893,000	99.77	107,000	0.23
4.	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	13,000,000	12,916,000	99.35	84,000	0.65
02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,642,396,800	1,561,725,081	95.09	80,671,719	4.91
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1,642,396,800	1,561,725,081	95.09	80,671,719	4.91
1.	Pelaksanaan koordinasi dibidang wawasan kebangsaan , bela negara, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	31,148,800	23,647,550	75.92	7,501,250	24.08
2	Pembentukan Paskibraka	1,611,248,000	1,538,077,531	95.46	73,170,469	4.54
03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1,238,202,265	1,230,452,775	99.37	7,749,490	0.63
1.	Perumusan Kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	1,238,202,265	1,230,452,775	99.37	7,749,490	0.63
1.	Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah	61,121,000	58,178,000	95.18	2,943,000	4.82

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
2.	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah	1,153,922,265	1,149,437,845	99.61	4,484,420	0.39
3.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah	23,159,000	22,836,930	98.61	322,070	1.39
04	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	77,664,400	66,888,500	86.13	10,775,900	13.87
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	77,664,400	66,888,500	86.13	10,775,900	13.87
1.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	77,664,400	66,888,500	86.13	10,775,900	13.87
05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	577,235,000	549,798,450	95.25	27,436,550	4.75
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	577,235,000	549,798,450	95.25	27,436,550	4.75
1.	Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	577,235,000	549,798,450	95.25	27,436,550	4.75
06	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	1,432,799,600	1,367,084,200	95.41	65,715,400	4.59
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	1,432,799,600	1,367,084,200	95.41	65,715,400	4.59
1.	Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	180,427,600	176,675,200	97.92	3,752,400	2.08

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
2.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	29,784,500	29,770,500	99.95	14,000	0.05
3.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1,222,587,500	1,160,638,500	94.93	61,949,000	5.07
TOTAL BELANJA		8,758,174,674	8,386,920,303	95.76	371,254,371	4.24

Tabel 3.42

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	3,789,876,609	100	557,020,580	100	661,704,759	100	616,989,435	95	1,767,473,023	98.43	3,610,971,297	98.43%	95.28%
Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi tepat waktu	100	67,975,803	100	3,500,000	100	12,404,850	100	13,433,924	100	31,158,750	100.00	61,281,024	100.00%	90.15%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	36,802,500	0	3,500,000	1	7,145,200	2	4,901,924	-	18,881,000	3	34,428,124	100.00%	93.55%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA- SKPD	2	3,118,000	0	-	1	-	1	-	-	2,950,000	2	2,950,000	100.00%	94.61%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA- SKPD	2	2,637,500	1	-	-	1,751,000	-	-	1	783,500	2	2,534,500	100.00%	96.09%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	25,417,803	4	-	2	3,508,650	2	8,532,000	2	9,327,750	10	21,368,400	100.00%	84.07%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100	2,116,351,066	100	472,311,276	100	536,510,403	100	442,139,204	100	590,976,457	100.00	2,041,937,340	100.00%	96.48%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17	2,067,704,566	17	466,611,276	17	525,116,803	17	433,274,204	17	574,485,357	17	1,999,487,640	100.00%	96.70%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18	48,646,500	5	5,700,000	4	11,393,600	5	8,865,000	4	16,491,100	18	42,449,700	100.00%	87.26%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100	13,054,000	100	1,900,000	100	4,091,000	100	2,850,000	100	2,669,630	100.00	11,510,630	100.00%	88.18%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4	13,054,000	1	1,900,000	1	4,091,000	1	2,850,000	1	2,669,630	4	11,510,630	100.00%	88.18%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	67,783,000	100	5,200,000	100	11,414,500	100	10,087,700	100	29,536,737	100.00	56,238,937	100.00%	82.97%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	4	35,257,000	1	5,200,000	1	9,075,000	1	8,363,700	1	8,917,188	4	31,555,888	100.00%	89.50%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5	32,526,000	0	-	1	2,339,500	1	1,724,000	3	20,619,549	5	24,683,049	100.00%	75.89%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	545,911,740	100	48,012,029	100.00	55,555,787	100	104,117,826	100	319,109,198	100.00	526,794,840	100.00%	96.50%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	20,270,000	1	-	1	6,160,000	1	-	1	14,110,000	4	20,270,000	100.00%	100.00 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	11	188,000,000	0	-	2	2,500,000	3	35,620,000	6	147,487,700	11	185,607,700	100.00%	98.73%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4	14,289,340	1	-	1	2,945,200	1	4,094,940	1	7,249,000	4	14,289,140	100.00%	100.00 %
Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	13,390,000	1	300,000	1	3,980,000	1	2,440,000	1	6,317,260	4	13,037,260	100.00%	97.37%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	8,040,000	15	1,260,000	15	2,090,000	15	1,940,000	15	2,750,000	60	8,040,000	100.00%	100.00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4	16,500,000	1	2,400,000	1	-	1	5,880,000	1	6,180,000	4	14,460,000	100.00%	87.64%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	285,422,400	3	44,052,029	3	37,880,587	3	54,142,886	3	135,015,238	12	271,090,740	100.00%	94.98%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100	761,061,000	0	-	-	-	100	11,877,000	78	680,630,320	87.50	699,507,320	87.50%	91.91%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	638,196,000	0	-	-	-	-	-	1	583,159,000	1	583,159,000	33.33%	91.38%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	103,865,000	0	-	-	-	-	-	10	97,471,320	10	97,471,320	100.00%	93.84%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	19,000,000	0	-	-	-	2	11,877,000	1	7,000,000	3	18,877,000	100.00%	99.35%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan (unit)	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00%	0.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	96,770,000	100	16,637,275	100	20,482,219	100	25,303,781	100	31,990,546	100	94,413,821	100.00%	97.57%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	1,610,000	1	100,000	1	592,000	1	268,509	1	588,745	4	1,549,254	100.00%	96.23%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	33,600,000	1	8,037,275	1	7,140,219	1	8,095,272	1	9,681,801	4	32,954,567	100.00%	98.08%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	61,560,000	1	8,500,000	1	12,750,000	1	16,940,000	1	21,720,000	4	59,910,000	100.00%	97.32%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (%)	100	120,970,000	100	9,460,000	100.00	21,246,000	100	7,180,000	100	81,401,385	100.00	119,287,385	100.00%	98.61%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	24,000,000	4	6,400,000	4	6,126,000	4	4,000,000	4	6,997,585	4	23,523,585	100.00%	98.01%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	36	37,970,000	7	3,060,000	6	2,620,000	4	3,180,000	19	28,094,800	36	36,954,800	100.00%	97.33%
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi (Unit)	2	46,000,000	0	-	1	12,500,000	1	-		33,393,000	2	45,893,000	100.00%	99.77%
Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi (Unit)	1	13,000,000	0	-	-	-	-	-	1	12,916,000	1	12,916,000	100.00%	99.35%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										88.77%	95.28%
				Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100.00	1,642,396,800	100	32,421,516	100	50,427,000	100	936,618,745	100	542,257,820	100	1,561,725,081	100.00%	95.09%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan pembauran kebangsaan	100	1,642,396,800	100	32,421,516	100	50,427,000	100	936,618,745	100	542,257,820	100	1,561,725,081	100.00%	95.09%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan (orang)	30	31,148,800	-	-	-	1,611,050	-	-	30	22,036,500	30	23,647,550	100.00%	75.92%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Pembentukan Paskibraka	Jumlah paskibraka (orang)	70	1,611,248,000	-	32,421,516	-	48,815,950	70	936,618,745		520,221,320	70	1,538,077,531	100.00%	95.46%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	95.09%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANG N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan etika serta budaya politik	100	1,238,202,265	0	11,905,000	-	4,910,950	100	1,110,793,020	-	102,843,805	100	1,230,452,775	100.00%	99.37%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah	100	1,238,202,265	100	11,905,000	100.00	4,910,950	100	1,110,793,020	100	102,843,805	100.00	1,230,452,775	100.00%	99.37%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun (dokumen)	1	61,121,000	0	2,250,000	-	1,498,000	-	8,210,000	1	46,220,000	1	58,178,000	100.00%	95.18%
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di	52	1,153,922,265	0	9,655,000	-	1,372,950	52	1,092,833,020	-	45,576,875	52	1,149,437,845	100.00%	99.61%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
	daerah (orang)														
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah (laporan)	4	23,159,000	1	-	1	2,040,000	1	9,750,000	1	11,046,930	4	22,836,930	100.00%	98.61%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.37%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100	77,664,400	28.00	4,910,000	50.93	21,813,500	90.74	3,520,000	143.53	36,645,000	143.52	66,888,500	143.52%	86.13%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawas	108	77,664,400	30	4,910,000	25	21,813,500	43	3,520,000	57	36,645,000	155	66,888,500	143.52%	86.13%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah (laporan)	4	77,664,400	1	4,910,000	1	21,813,500	1	3,520,000	1	36,645,000	4	66,888,500	100.00%	86.13%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	86.13%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	100	577,235,000	100	3,040,000	100	196,452,000	100	169,936,700	100	180,369,750	100	549,798,450	100.00%	95.25%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	100	577,235,000	100	3,040,000	100	196,452,000	100	169,936,700	100	180,369,750	100	549,798,450	100.00%	95.25%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah (orang)	575	577,235,000	0	3,040,000	47	196,452,000	178	169,936,700	350	180,369,750	575	549,798,450	100.00%	95.25%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	95.25%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100	1,432,799,600	100	10,140,500	100	67,448,700	100	33,778,000	100	95,078,500	100	1,367,084,200	100.00%	95.41%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social	100	1,432,799,600	100	10,140,500	100.00	67,448,700	100	33,778,000	100	95,078,500	100	1,367,084,200	100.00%	95.41%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjas ama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah (orang)	164	180,427,600	0	7,320,500	-	60,158,200	112	27,148,000	52	82,048,500	164	176,675,200	100.00%	97.92%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah (laporan)	4	29,784,500	1	2,820,000	1	7,290,500	1	6,630,000	1	13,030,000	4	29,770,500	100.00%	99.95%
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4	1,222,587,500	1	-	1	477,658,500	1	2,080,000	1	680,900,000	4	1,160,638,500	100.00%	94.93%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	95.41%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		8,758,174,674		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										95.14%	95.76%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja tahun 2025 merupakan laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur. Laporan kinerja ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat.

Penyajian data laporan kinerja ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sesuai dengan RENSTRA tahun 2021 – 2024 dan tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum hasil analisis pencapaian indikator kinerja sasaran strategis OPD, mencapai dan bahkan melampaui dari target yang ditetapkan;
2. Dari sisi pencapaian akuntabilitas keuangan, tingkat capaian realisasi keuangan tahun 2025 sebesar Rp. **8.386.920.303,-** (Delapan milyar tiga ratus delapan puluh enama juta Sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau **95,76%**. Dalam pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar **4,24%** atau secara absolute sebesar **Rp. 371,254,371,-**

4.2. SARAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur ke depan, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur secara umum, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
3. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
4. Memperkuat komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya.